



REVISI 2

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun 2020 - 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR 218 / HK.310 / C / 5 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TANAMAN PANGAN NOMOR 107/HK.310/C/5/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti adanya perubahan kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 107/HK.310/C/5/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 292/HK.310/C/12/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663)
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021; dan perubahannya;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 107/Hk.310/C/5/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran jangka menengah/jangka pendek Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan sebagai acuan penyusunan rencana strategis unit organisasi Eselon II serta Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) periode 5 (lima) tahun terhitung 2020-2024.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini., segala ketentuan didalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor Nomor 107/HK.310/C/5/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 292/HK.310/C/12/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 SEPTEMBER 2021

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



SUWANDI

NIP 196703231992031003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan.

Daftar Isi

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi Umum	4
1.3. Potensi dan Permasalahan	12
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ...	27
2.1. Visi	27
2.2. Misi	30
2.3. Program dan Tujuan	31
2.4. Sasaran Strategis	38
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	43
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	43
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian dan Ditjen Tanaman Pangan	61
3.3. Kerangka Regulasi	101
3.4. Kerangka Kelembagaan	103
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...	119
4.1. Target Kinerja	119
4.2. Kerangka Pendanaan	128
BAB V. PENUTUP	131
LAMPIRAN	133

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

1. Komoditas Binaan Ditjen Tanaman Pangan	14
2. Analisis SWOT Tanaman Pangan	26
3. Struktur database RSPP	33
4. Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024	34
5. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024	38
6. Sasaran dan indikator PP 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	47
7. Sasaran dan indikator PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	48
8. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	51
9. Kegiatan Utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian	79
10. Indikator Pangan dan Pertanian RPJMN Tahun 2020-2024	86
11. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	120
12. Target Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2020-2024	125
13. Target RPJMN 2020-2024 yang terkait Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	127
14. Target Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 (Tentative)	128

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Proyeksi Dependency Ratio dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2015-2045	16
2. Gambar 2. Pertumbuhan PDB dan NTP Tahun 2020 (y on y)	22
3. Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	40
4. Peta Strategis Kementan_Ditjen Tanaman Pangan	42
5. Pendekatan Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian, Tahun 2020-2024	82
6. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian	105
7. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	118

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kedaulatan pangan serta pertumbuhan perekonomian negara. Salah satu prioritas nasional yang menjadi fokus Kementerian Pertanian yaitu penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas nasional tahun 2020 – 2024 pada diantaranya yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan nilai tambah lapangan dan investasi disektor riil dan industrialisasi.

Pertanian harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan pertanian/agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Mulai tahun anggaran 2021, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai

implementasi penerapan kebijakan *money follow program*, memperkuat anggaran berbagai kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian/ Lembaga. serta sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan. Prinsip RSPP yaitu Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit Eselon I tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L yang merupakan hasil rumusan kemenkeu, Bappenas dan K/L; Outcome mencerminkan hasil kerja program yang ingin dicapai secara Nasional. Bagi program yang digunakan lintas K/L atau lintas Unit Eselon I, maka rumusan outcomenya dimungkinkan berbeda sesuai tugas unit atau keterlibatannya dalam mendelivery program dimaksud; Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/ kuantitatif; Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit Eselon II atau Satker Vertical dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya outcome dana dapat bersifat lintas Eselon II, lintas unit Eselon I; Nomenklatur output dibedakan menjadi Output Program (OP), Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu. RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.

Beberapa tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar, Pandemi covid-19 berdampak terhadap keseluruhan tatanan pembangunan nasional, Untuk itu, peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Percepatan pelaksanaan pembangunan pertanian untuk menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan negeri perlu dilakukan secara sistematis yang memerlukan sebuah perencanaan yang jelas. Untuk itu perlu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sedang berjalan Renstra wajib disusun. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJMN dan menjadi salah satu dasar dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Renstra 2020-2024 digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, dan penyusunan RKA/KL.

1.2. KONDISI UMUM

Tahun 2015-2019 visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu “ Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup secara berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan pangan.” Misi tahun 2015-2019 yaitu :

1. Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai tambah dan daya saing;
3. Mewujudkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Program tahun 2015-2019 yaitu peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Sasaran program tahun 2018 – 2019 yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai, meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman pangan.

Tujuan tahun 2015-2019 yaitu :

1. Mewujudkan swasembada padi, jagung berkelanjutan, meningkatkan produksi kedelai dan komoditas utama tanaman pangan lainnya;
2. Mengembangkan komoditas tanaman pangan bernilai ekonomi;
3. Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

1.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2015

Dari 10 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015, menghasilkan kinerja sembilan indikator dengan capaian kategori Sangat Berhasil (capaian diatas 100%) meliputi produktivitas padi, jagung, kedelai, penggunaan benih unggul bersertifikat padi, jagung, kedelai, dan pengamanan tanaman padi, jagung dan kedelai dari gangguan OPT dan DPI. Sedangkan tiga indikator dengan kategori Berhasil (capaian 80-100%) yaitu produktivitas ubi kayu.

Berdasarkan Angka Ramalan II BPS RI Tahun 2015, produktivitas padi 52,89 ku/ha, lebih tinggi 1,49 ku/ha dari tahun sebelumnya. Capaian produktivitas padi mencapai 102,90% terhadap target 51,40 ku/ha. Berdasarkan Angka Ramalan II BPS RI Tahun 2015, produktivitas jagung 51,39 ku/ha, lebih tinggi 0,85 ku/ha dari tahun sebelumnya. Capaian produktivitas jagung 2016 mencapai 101,68% dibanding target 50,54% ku/ha. Berdasarkan Angka Ramalan II BPS RI Tahun 2015, produktivitas kedelai mencapai 15,73 ku/ha, lebih tinggi 0,23 ku/ha dibanding tahun sebelumnya. Capaian produktivitas kedelai mencapai 101,48% dibanding target {15,50 ku/ha}.

Produktivitas ubi kayu berdasarkan Angka Aram II BPS Tahun 2015 sebesar 233,68 ku/ha dengan capaian 99,86% dari target 234 ku/ha. Tingkat capaian penggunaan benih varietas unggul bersertifikat padi, jagung dan kedelai berturut-turut yaitu padi 101,76%

(50,88% dari target 50%) , jagung 100,80% (50,40% dari target 50%), dan kedelai 38,56% dari target 35% (110,17%).—Capaian pengamanan pertanaman dari gangguan OPT dan DPI padi mencapai 103,14% (95,92% dari target 93%), jagung 100,18% (98,18% dari target 98%), dan kedelai 100,25% (97,24 dari target 97%).

1.2.2. Capaian Kinerja 2016

Capaian kinerja tahun 2016 dari sepuluh indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016, menghasilkan tujuh indikator kinerja dengan capaian kategori Sangat Berhasil (capaian diatas 100%) meliputi produktivitas padi, jagung, ubi kayu, penggunaan benih unggul bersertifikat jagung, kedelai, dan pengamanan tanaman padi dan jagung. Sedangkan tiga indikator dengan kategori Berhasil (capaian 80-100%) yaitu produktivitas kedelai, penggunaan benih unggul bersertifikat padi, dan pengamanan tanaman kedelai.

porcapaian produktivitas padi mencapai 100,55% (52,64 ku/ha dari target target 52,35 ku/ha). Berdasarkan Angka Prakiraan 2016, Capaian produktivitas jagung 2016 mencapai 100,38% (52,83` ku/ha dari target 52,63%). Berdasarkan Angka Prakiraan tahun 2016, capaian produktivitas kedelai mencapai 95,56% (15,06ku/ha dari {15,76 ku/ha). Capaian Produktivitas ubi kayu sebesar 100,83% (241,98 ku/ha dari target 240 ku/ha).

Pada tahun 2016 tingkat, capaian penggunaan benih

varietas unggul bersertifikat padi, jagung dan kedelai berturut-turut yaitu 87,04% (43,52% dari target 50%), 104,56% (52,28% dari target 50%) dan 134,11% (46,94% dari target 35%). Pada tahun 2016 capaian pengamanan pertanaman dari gangguan OPT dan DPI padi mencapai 105,59% (98,20% dari target 93%), jagung 100,63% (98,62% dari target 98%), dan kedelai 99,79% (96,79% dari target 97%).

1.2.3. Capaian Kinerja 2017

Dari sembilan indikator kinerja utama, menghasilkan enam indikator kinerja dengan capaian kategori **Sangat Berhasil** (capaian diatas 100%) meliputi penggunaan benih unggul bersertifikat padi, jagung dan kedelai serta luas aman tanaman padi, jagung dan kedelai. Sedangkan tiga indikator dengan kategori Berhasil (capaian 80-100%) yaitu produktivitas padi, jagung dan kedelai.

Produktivitas padi 2017 (51,54) lebih rendah dibanding targetnya (52,61) atau hanya mencapai 97,97%. Produktivitas jagung 2017 (52,00) lebih rendah dibanding targetnya (53,67) atau mencapai 96,89%. Produktivitas kedelai 2017 (15,20) mencapai 95,00% dibanding target (16,00).

Pada tahun 2017 tingkat penggunaan benih varietas unggul bersertifikat padi, jagung dan kedelai semuanya mencapai diatas target yang ditetapkan dalam sasaran indikator kinerja (Sangat Berhasil), yakni padi 104,08%, jagung 105,36% dan kedelai 141,00%. Target tingkat penggunaan benih padi, jagung, dan kedelai

selama periode Renstra 2015-2019 tetap, yaitu masing masing sebesar 50%, 50%, dan 35%, dengan realisasi masing-masing 52,35%, 52,68%, dan 49,35%.

Terlaksananya Luas Areal Tanaman Pangan yang Aman Dari Gangguan OPT dan DPI, dengan target padi sebesar 93%, jagung 98%, dan kedelai 97%. Pada tahun 2017 capaian pengamanan pertanaman dari gangguan OPT dan DPI padi mencapai 95,30% (102,47% dari target 93%), jagung 98,57% (100,58% dari target 98%), dan kedelai 99,07% (102,14% dari target 97%).

1.2.4. Capaian Kinerja 2018

Dari sepuluh indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja program pembangunan tanaman pangan, enam diantaranya dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil (capaian >100%), yaitu produksi padi, produksi jagung, rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan, nilai AKIP Ditjen TP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen TP. Indikator yang dikategorikan berhasil (capaian 80-100%) adalah Nilai Kinerja/NK berdasarkan PMK 249 Tahun 2011, pertumbuhan volume ekspor dan penurunan volume impor untuk produk pertanian tanaman pangan. Dua indikator yang dikategorikan kurang berhasil (capaian <60%) adalah produksi kedelai dan rasio ketersediaan alat mesin pertanian (Alsintan) pascapanen tanaman pangan berdasarkan kebutuhan.

Produksi padi Tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton, atau mencapai 100,65 % dari target indikator kinerja 82,50 juta ton. produksi jagung Tahun 2018 mencapai 30,06 juta ton, atau mencapai 100,19 % dari target indikator kinerja 30,00 juta ton. Produksi kedelai Tahun 2018 mencapai 0,98 juta ton, atau mencapai 44,66% dari target indikator kinerja 2,20 juta ton.

Indikator pertumbuhan volume ekspor produk tanaman pangan Tahun 2018 adalah 7,70%, yang artinya ekspor produk tanaman pangan Tahun 2018 mencapai 96,26% dari target 8.00% di Tahun 2017 atau dengan kata lain volume ekspor 2018 masih dibawah Tahun 2017. Indikator penurunan volume impor produk tanaman pangan Tahun 2018 adalah 5,06%, yang artinya adanya kenaikan impor Tahun 2018, tidak dapat memenuhi impor maksimum yang ditargetkan, sehingga capaiannya 98,81% dibandingkan target 5%.

Rasio ketersediaan alsintan pascapanen tanaman pangan berdasar kebutuhan yaitu 16,95%. Kebutuhan alsintan pascapanen sebanyak 302.816 unit, sedangkan alsintan pascapanen yang tersedia sebanyak 51.325 unit. Apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2018 (42,5%) baru tercapai 39,88.

Rasio luas serangan OPT utama dan DPI Tahun 2018 berdasarkan luas terkena untuk tanaman pangan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar sebesar sebesar 2,94% atau mencapai 170,07% dari target serangan 5%.

Berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja, SAKIP Ditjen Tanaman Pangan 2017 mendapatkan nilai 87,49 (A/Memuaskan) atau mencapai 104,15% dari target indikator kinerja 2018 sebesar 84. Nilai Kinerja Ditjen Tanaman Pangan 71,42 atau mencapai 97,84% dari target indikator kinerja 2018 sebesar 73%. Nilai ini diperoleh langsung dari dashboard aplikasi Monev SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan. Berdasarkan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT/080/4/2018, nilai IKM terhadap Layanan Publik Ditjen Tanaman Pangan 2018 mencapai 3,46 atau mencapai 108,13% dari target indikator kinerja 3,2 dan meningkat 2,37% dari IKM 2017.

1.2.5. Capaian Kinerja 2019

Dari sepuluh indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja program pembangunan tanaman pangan, lima diantaranya dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil (capaian >100%), yaitu penurunan volume impor untuk produk pertanian tanaman pangan, rasio ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) pasca panen tanaman pangan berdasarkan kebutuhan, Nilai AKIP Ditjen TP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal kementerian pertanian, Nilai Kinerja/NK berdasarkan PMK 249 Tahun 2011, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen TP. Dua indikator dengan kategori berhasil (capaian 80-100%) antara lain pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan dan

rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanaman pangan.

Produksi padi Tahun 2019 mencapai 54,60 juta ton, atau mencapai 65,00% dari target indikator kinerja sebesar 84,00 juta ton. Produksi jagung Tahun 2019 mencapai 22,59 juta ton, atau mencapai 68,45% dari target indikator kinerja 33,00 juta ton. Produksi kedelai Tahun 2019 sebesar 0,42 juta ton, atau mencapai 15,15% dari target indikator kinerja 2,80 juta ton.

Volume ekspor 2019 ubi jalar adalah 10.816 ton, dan volume ekspor kacang tanah sebesar 4.910 ton. Indikator pertumbuhan volume ekspor produk tanaman pangan Tahun 2019 adalah 9,65%, yang artinya ekspor produk tanaman pangan Tahun 2019 mencapai 96,5% dari target volume ekspor di Tahun 2018. Volume impor ubi kayu dan kacang hijau tahun 2019 turun 44.531 ton dari tahun 2018, sehingga penurunannya 4,53% dan capaiannya 110,38% dari target 5%.

Rasio ketersediaan alsintan pascapanen tanaman pangan berdasar kebutuhan yaitu 55,79%. Rasio luas serangan OPT utama dan DPI Tahun 2019 berdasarkan luas terkena untuk tanaman pangan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar sebesar sebesar 5,20% atau mencapai 96,15% dari target serangan 5%.

Nilai SAKIP Ditjen Tanaman Pangan 2018 mendapatkan nilai 90,80 (AA/Sangat Memuaskan) atau mencapai 106,82% dari target indikator kinerja 2019 sebesar

85. Capaian Nilai kinerja Ditjen Tanaman Pangan sebesar 80,39 atau mencapai 108,64% dari target indikator kinerja 2019 sebesar 74%. Nilai ini diperoleh langsung dari *Dashboard* Aplikasi Monev SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan. Nilai IKM terhadap Layanan Publik Ditjen Tanaman Pangan 2019 mencapai 3,52 atau mencapai 106,67% dari target indikator kinerja 3,30 dan meningkat 1,73% dari IKM 2018.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1. Potensi

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan yaitu lahan pertanian, keanekaragaman hayati, jumlah penduduk yang besar, inovasi dan teknologi bidang pertanian.

a. Lahan Pertanian

Indonesia memiliki potensi lahan yang cukup besar dan belum semuanya dimanfaatkan secara optimal. Lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal yaitu lahan sub optimal seperti lahan kering, rawa pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya relatif rendah. Apabila dikelola dengan benar maka lahan tersebut dapat berubah menjadi lahan – lahan produktif untuk pengembangan budidaya berbagai komoditas tanaman pangan.

Data dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha diantaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi).

b. Keanekaragaman Hayati

Selain itu, keanekaragaman hayati merupakan potensi besar yang menjadi sumber daya pertanian. Keanekaragaman hayati didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun disebagian wilayah. Beragamnya hayati darat Indonesia dapat dilihat juga dengan adanya beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dan kesehatan hewan. Komoditas binaan tersebut dan produk turunannya dibina oleh Kementerian Pertanian.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian nomor 104 tahun 2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian, bahwa komoditas binaan Ditjen Tanaman Pangan yaitu padi, palawija, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Uraian komoditas tanaman pangan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1. Komoditas Binaan Ditjen Tanaman Pangan

No.	Nama Indonesia	Nama Latin
I.	Padi	<i>Oryza sativa</i> L.
II.	Palawija:	
1.	Gandum	<i>Triticum</i> spp.
2.	Rotong	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv
3.	Jagung	<i>Zea mays</i> L.
4.	Juwawut	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.Br.
5.	Shorgum	<i>Sorghum</i> spp.
6.	Hanjeli	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.
7.	Soba	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench
III.	Kacang-kacangan dan Umbi-umbian:	
1.	Gadung	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.
2.	Ganyong	<i>Canna discolor</i> Lindl.
3.	Garut	<i>Maranta arundinacea</i> L.
4.	Gembili	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burkill
5.	Ilex-ilex	<i>Amorphophallus oncophyllus</i> Prain ex Hook.f.
6.	Kacang Gude/Hiris	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.
7.	Kacang Hijau	<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek.
8.	Kacang Rawai	<i>Phaseolus lunatus</i> L.
9.	Kacang Tanah	<i>Arachis hypogaea</i> L.
10.	Kacang Tunggak	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
11.	Kedelai	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
12.	Kimpul	<i>Xanthoxoma violaceum</i> Schoot
13.	Kacang Merah	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
14.	Kacang Nagara	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. ssp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.
15.	Kacang Bogor	<i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc.
16.	Kacang Koro Benguk	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.

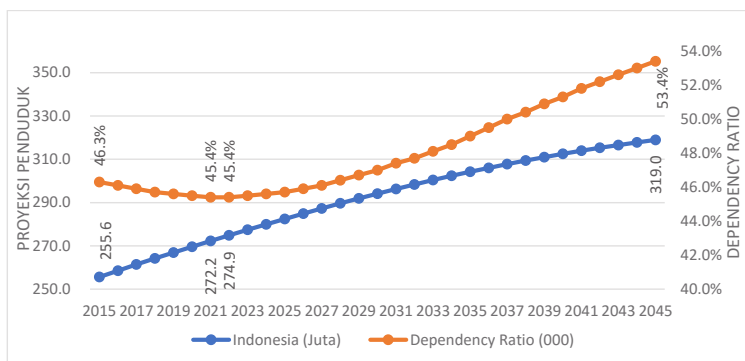
No.	Nama Indonesia	Nama Latin
17	Kacang Korma	<i>Eubiot purpuratus</i> (L.) Swart
18	Kacang Koro-Panjang	<i>Conocleba glabrata</i> Champ / DC.
19	Panjang	<i>Anomopachilus muscivorus</i> Blume
20	Sureng	<i>Anomopachilus conopseaensis</i> Genes.
21	Talas Padang	<i>Colocasia gigantea</i> (Blume, Hance)
22	Talas Japang (Goching)	<i>Colocasia esculenta var esculenta</i> (L.) Schott
23	Talas Boga	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott
24	Talas Belitong	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott
25	Ubi Jalar	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.
26	Ubi Sapi	<i>Manihot esculenta</i> Crantz

c. Jumlah Penduduk

Selain itu, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung pengembangan pertanian. Berdasarkan data Sakernas (2018), lebih dari 35,7 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Apabila pengetahuan dan keterampilan penduduk di suatu wilayah dapat ditingkatkan agar mampu bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan global.

Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan Penduduk ada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau tumbuh 24.80% (63,37 Juta Jiwa) dari 2015. Sementara itu, *dependency*

ratio terendah berada pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 45.4% (Gambar 9), dan hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing Bangsa. Pemenuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu merupakan syarat dasar dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing angkatan kerja Nasional. Oleh karena itu, dalam rangka menyikapi pesatnya pertumbuhan penduduk ke depan maka diperlukan strategi peningkatan daya saing angkatan kerja nasional, dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.



Gambar 1. Proyeksi *Dependency Ratio* dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2015-2045.

d. Inovasi dan Teknologi

Pengembangan inovasi dan teknologi semakin meningkat seiring dengan tingginya tuntutan terhadap pertanian. Berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk

menggal potensi sumber daya pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi. Berbagai varietas serta klon tanaman dan ternak unggul, teknologi pupuk, alat dan mesin pertanian, bioteknologi, nanoteknologi, aneka teknologi budi daya, pascapanen, dan pengolahan hasil pertanian telah tersedia.

1.3.2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan yaitu :

a. Lahan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan yaitu :

- semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, alih fungsi lahan produktif ke industri akibat kebijakan.
- minat terhadap pertanian berkurang, investasi masih rendah karena masih didominasi subsektor perkebunan dan industri makanan sehingga diperlukan kebijakan pengembangan kemudahan dan insentif berinvestasi di subsektor tanaman pangan;
- kepemilikan lahan dan skala usaha petani relatif kecil/sempit sehingga sulit untuk menyangga kehidupan keluarga tani. perlu dilakukan percepatan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani.

- Produktivitas lahan menurun akibat intensifikasi berlebihan dan penggunaan pupuk kimia secara terus menerus tanpa diimbangi penggunaan pupuk organik.
- Belum optimalnya implementasi pemetaan komoditas terkait dengan agroekosistem lahan.
- Masih banyak lahan tidur.
- adanya penurunan luas baku sawah sebesar 0,7 Juta Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 339/KEP-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional.

b. Produksi dan Produktivitas

Biaya produksi relative tinggi, produksi dan produktivitas belum maksimal, Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani. Di beberapa wilayah tertinggal, masih banyak petani yang tidak menggunakan pupuk bahkan tanpa perawatan sehingga produktivitas rendah.

c. Fluktuasi harga tinggi

Fluktuasi harga pada beberapa komoditas tanaman pangan dimana pada saat musim panen raya harga cenderung jatuh. Sebagian besar petani pada saat musim panen langsung menjual hasil panen dalam bentuk gabah kering panen maupun jagung pipil basah dengan kadar air masih tinggi sehingga nilai jual rendah. Pada saat panen raya seringkali harga tidak wajar bergantung pedagang, tengkulak, hal ini mengakibatkan banyak petani yang tidak merasakan hasil panen karena pendapatan menjadi rendah.

d. Mutu Hasil dan Daya Saing Produk

- Mutu hasil tanaman pangan masih kurang bagus, dan daya saing masih kurang maksimal karena keterbatasan penguasaan penanganan pasca panen dan pengolahan
- Lemahnya daya saing komoditas pangan di pasar internasional.
- Harga beras dan jagung Indonesia di pasar dunia jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga dunia;
- Kurangnya orientasi agribisnis
- Kemampuan mengakses pasar masih rendah

e. Kelembagaan Petani

- Kelembagaan petani belum berfungsi secara optimal
- Lemahnya kesadaran berorganisasi
- Kurang berfungsinya sebagian organisasi yang ada

- Organisasi tani kurang mandiri.
- f. Permodalan
 - Permodalan petani rendah
 - Sistem perbankan yang kurang berpihak pada petani
 - Asuransi pertanian belum mencakup seluruh komoditas pertanian
 - Masih banyak sistem ijon.
- g. Teknologi
 - Sistem alih teknologi lemah
 - Penerapan teknologi kurang tepat sasaran
 - Semakin banyaknya penerapan teknologi tidak ramah lingkungan.
- h. Sumber Daya Manusia
 - Pendidikan formal rendah
 - Rendahnya regenerasi petani
 - Rata-rata petani miskin sehingga sulit dikembangkan
 - Bekerja tidak efisien.
- i. Dampak Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim ditandai oleh perubahan siklus hidrologi alam yang dapat menyebabkan bencana alam seperti meningkatnya intensitas curah hujan sehingga terjadi banjir (kondisi La Niña) dan bahkan sebaliknya dapat menimbulkan kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan (El Niño). Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi pertanian dan dapat menyebabkan puso/gagal panen.

Dampak perubahan iklim merupakan permasalahan dunia yang harus segera diantisipasi. Dampak perubahan iklim global terhadap sector pertanian bersifat kontinu, diskontinu dan permanen. Dampak kontinu berupa kenaikan suhu udara, perubahan hujan, dan kenaikan salinitas air tanah untuk wilayah pertanian dekat pantai yang akan menurunkan produktivitas tanaman dan perubahan panjang musim yang mengubah pola tanam dan indeks penanaman. Dampak yang bersifat diskontinu seperti meningkatnya gagal panen akibat meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim (banjir, kekeringan, angin kencang, dll) dan meningkatnya gagal panen akibat munculnya serangan atau ledakan hama penyakit baru tanaman. Dampak yang bersifat permanen berupa berkurangnya luas kawasan pertanian di kawasan pantai akibat kenaikan muka air laut. Data luas kerusakan akibat perubahan iklim dapat di lihat pada lampiran.....

- j. Pandemi Covid-19 terhadap pembangunan Pertanian khususnya Tanaman Pangan

Memasuki tahun 2020, perekonomian nasional mengalami tekanan akibat dampak pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid- 19). *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan

Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan bagi perekonomian domestik sehingga pada tahun 2020 perekonomian nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 2,07 persen (yoy) dibanding tahun 2019. Meskipun pertumbuhan terkontraksi, PDB sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Kontribusi positif sektor pertanian terhadap PDB di tengah pandemi Covid-19 seharusnya berdampak positif juga bagi petani. Namun, peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP) tidak sebanding dengan PDB sektor pertanian yang mampu tumbuh di atas 2 persen dari kuartal 1 sampai kuartal IV (Gambar 2).



Gambar 2. Pertumbuhan PDB dan NTP Tahun 2020 (y on y)
Sumber: BPS, diolah.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian.

1.3.3. Analisa Swot

Secara umum, analisa SWOT dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan), sedangkan faktor eksternal meliputi Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman).

1. Strength (kelebihan)

Strength merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap pertanian tanaman pangan pada saat ini atau pun di masa yang akan datang, yaitu :

- a. Potensi lahan pertanian yang luas
- b. Keanekaragaman hayati
- c. Jumlah penduduk yang besar
- d. Inovasi dan teknologi bidang pertanian

- e. Kondisi tanah dan klimatologis mendukung untuk tanaman pangan;
 - f. Curah hujan cukup dan merata;
 - g. Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dengan memanfaatkan tanah tegalan, lahan tidur, tanah perhutani, tanah perhutanan;
 - h. Dukungan penyuluhan.
2. Weakness (Kelemahan)
- a. Keterbatasan kepemilikan lahan oleh petani;
 - b. Produksi dan Provititas belum maksimal
 - c. Topografi lahan berbukit yang tidak dapat disentuh oleh Alsintan sehingga membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang tinggi
 - d. Rendahnya penguasaan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan
 - e. Keterbatasan informasi pasar
 - f. Keterbatasan modal
 - g. Rendahnya penguasaan teknologi informasi;
 - h. Investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di sub sektor tanaman pangan;
 - i. Tidak adanya keterkaitan (*linkage*) antara sektor pertanian dan industri yang menggunakan bahan baku pertanian;
 - j. Ketersediaan produk pertanian tidak sepanjang waktu.
3. Opportunities (Peluang)
- a. Meningkatnya kebutuhan produk tanaman pangan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pangan, pakan dan bahan bakar;

- b. Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi;
 - c. Kerjasama dengan perguruan tinggi/ stakeholders terkait untuk melakukan penelitian dan pengembangan usaha
 - d. KUR dan asuransi pertanian.
 - e. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN, Renstra Kementerian menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan tanaman pangan.
4. Threats (Ancaman)
- a. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian
 - b. Berkurangnya minat tenaga kerja di sektor pertanian
 - c. Perdagangan bebas
 - d. Dampak Perubahan Iklim
 - e. Fluktuasi harga
 - f. Banyak produk impor pertanian tanaman pangan yang berkualitas dan harga murah.

Tabel 2. Analisis SWOT Tanaman Pangan

KEKUATAN		KELEMAHAN	
a	Potensi lahan pertanian yang luas	a	Keterbatasan pemilikan lahan
b	Ketersediaan air yang memadai	b	Mutu hasil belum optimal dan daya saing rata-rata masih rendah
c	Jumlah penduduk yang besar	c	Kelembagaan masih kurang di tingkat petani
d	Inovasi dan teknologi bidang pertanian	d	Dukungan pemerintah
e	Kondisi tanah dan klimatologis mendukung untuk tanaman pangan	e	Dukungan teknologi belum merata dan adopsi teknologi masih rendah
f	Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dengan memanfaatkan tanah tegalan, lahan tidur, tanah pertanahan, tanah	f	Sumber Daya Manusia (tingkat pendidikan, keahlian, motivasi) masih rendah
g	Dukungan penyuluhan	g	Penanganan OPT dan DPI oleh tenaga wilayah belum optimal
PELUANG		ANCAMAN	
a	Meningkatnya kebutuhan produk tanaman pangan	a	Konversi pertanahan lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian
b	Komitmen Pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian	b	Fluktuasi harga tinggi
c	Kerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dalam hal riset dan inovasi	c	Berkurangnya minat tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian
		d	Sinergi lintas K/L, perguruan tinggi dan lembaga masih kurang
		e	Perubahan iklim
		f	Pandemi

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi pembangunan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam visi Presiden dan wakil presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Sebagaimana Visi besar Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian merupakan kemampuan di sektor pertanian memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk lain yang menjadi saingannya dengan adanya nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni “ **Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**”

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam mendukung visi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkontribusi terhadap peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, peningkatan daya saing tanaman pangan melalui program dukungan manajemen, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program nilai tambah dan daya saing industry.

2.2. MISI

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Pertanian mendukung tercapainya Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

3.3. PROGRAM DAN TUJUAN

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (*redesign*) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga. Mulai tahun anggar 2021, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai implementasi penerapan kebijakan *money follow program*, memperkuat anggaran berbagai kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian/Lembaga. serta sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan

RSPP meliputi redesain program, keluaran (Output) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Redesain Program
 - Program mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang dapat digunakan oleh

1 (satu) atau lebih Unit Kerja Eselon (UKE) 1

- Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara Nasional
- Jenis Program: Program generik dan program teknis (spesifik K/L dan lintas K/L)
- Untuk Program teknis lintas K/L, rumusan sasaran program dan indikator kinerja program dapat dirumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit serta kontribusinya terhadap program.

2. Redesain Kegiatan

- Kegiatan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran
- Jenis kegiatan: kegiatan generik dan kegiatan teknis (spesifik dan lintas)
- Pada kegiatan lintas, akuntabilitas kinerja dirumuskan dengan rumusan sasaran kegiatan dan/atau indikator kinerja kegiatan yang berbeda untuk Unit Kerja Pelaksana masing-masing.

3. Redesain Output

- Rumusan nomenklatur output dibedakan menjadi 2 (dua): Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)
- KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu
- RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara

langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.

Tabel 3. Struktur database RSPP

Existing (2020)		Rencana (2021)	
Program: - Sektor Program - Sub-Sektor Program - Sektor Kegiatan - Indikator Output Program		Program: - Sektor Kegiatan - Indikator Kegiatan Program - Indikator Program - Indikator Output Program	
Kegiatan: - Unit Kegiatan		Kegiatan: - Kegiatan Kegiatan	
Output Kegiatan: - Indikator Output Kegiatan		Klasifikasi Rincian Output (KRO)	
Sub-Output		Rincian Output (RO)	
Komponen		Komponen	

IKRAN di SAKTI		DIPA	
Program (KRO, RO, RO)		Program	
Kegiatan (KRO)		Kegiatan	
KRO		KRO	
KRO RO			
Rincian Output (RO)			
Komponen			
Sub-komponen			
Aksi		Aksi	
Detail Aksi			

● Struktur Chart of Account (COA) di SPAN

Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan kodefikasi Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) dalam rangka mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas, serta akselerasi ekspor pertanian.

Kodefikasi program, kegiatan, KRO, RO tertuang dalam Dokumen DIPA dan POK sebagai acuan dalam pelaksanaan, pelaporan serta pengukuran kinerja realisasi pencapaian volume KRO/RO. Komoditas prioritas yang difasilitasi melalui bantuan pemerintah meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, shorgum, porang, dan talas. Fasilitasi bantuan pemerintah dialokasikan berdasarkan pertimbangan kondisi APBN dan rencana kerja Pemerintah.

Dengan adanya perancangan kembali (*redesign*) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian maka program-program Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sesuai dengan kewenangannya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4. Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024.

No.	Program	Sasaran Program
1.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis 2. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan 4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai Kebutuhan 6. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri 7. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan 8. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar 9. Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati 10. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien
2.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian 2. Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian

No.	Program	Sasaran Program
3.	Dukungan Manajemen	1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan 4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 5. Meningkatnya maturitas SPIP
4.	Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
5.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

Perubahan program ini akan berdampak dalam perubahan susunan sasaran program, kegiatan dan indikatornya dalam matrik target kinerja 2020-2024 terlampir.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 terdiri dari tiga program yaitu 1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; 2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan 3) Dukungan Manajemen.

Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator:
 - a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
 - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),

- c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/ hari hingga tahun 2024,
 - d. Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
 - e. Prevalence of Under-nourishment /PoU (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
 - f. Food Insecurity Experience Scale /FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),
 - g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),
 - h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
 - i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
 - j. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024);
 - k. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator:
- a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024),
 - b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),

- c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
- d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
- 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan indikator:
 - a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dengan target 65 % (Th. 2020) dan 75 % (Th.2024).
- 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan indikator:
 - a. Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70% (Th. 2020) dan 90 % (Th.2024).
- 5. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th.2020) dan 82,96 (Th. 2024),
 - b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga 2024.

Tujuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024 yaitu :

- 1. Meningkatnya produksi untuk pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, aneka umbi)
- 2. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan tanaman pangan, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan ekspor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, aneka umbi, aneka kacang);

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; indikator tujuan ini yaitu :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Tanaman.

Tabel 5. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan berkelanjutan	Produksi padi (Mta Tmt)	54.67	55.80	57.50	60.50	65.40
		Produksi Jagung (KA 2304) (Mta Tmt)	22.92	23.00	25.00	30.00	35.30
		Produksi Jagung (KA 1404) (Mta Tmt)	19.84	20.01	22.02	26.10	30.71
		Produksi Kedelai (Mta Tmt)	0.27	0.61	0.71	0.80	0.88
		Produksi Ubi Kayu (Mta Tmt)	16.03	17.75	18.99	20.32	21.84
		Produksi Ubi Jalar (Mta Tmt)	1.24	1.65	1.78	1.89	2.03
2	Meningkatkan daya yang koordinasi urusan tanaman pangan	Pertumbuhan volume eksekusi untuk produksi pertanian tanaman pangan (%)	10	11	12	13	14
3	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Tanaman (R-BIR)	30.530	30.838	31.703	32.705	33.886

Keterangan : Pencapaian target tersebut dipengaruhi Dukungan Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan, Dukungan kegiatan Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga terkait, Investor, Swadaya dan kondisi lingkup yang dipengaruhi oleh OPT dan DPI, sehingga target bersifat tentative menyesuaikan kondisi pendukungnya yang dapat dijelaskan melalui laporan kinerja tahunan.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 disusun menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*,

customer, internal process dan learning and growth perspective.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
2. Peningkatan Akses Pangan
3. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas
4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan
5. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani
6. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
7. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan
8. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan
9. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
10. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian

SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

11. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

12. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
- SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
 13. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan
 14. Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi
- SS4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
 15. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya
 16. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel
 17. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
 18. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian



Gambar 3. Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Dari sasaran strategis tersebut, yang dapat diturunkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu :

- SS1 : Meningkatnya ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas;
- SS2 : Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
- SS5 : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta terwujudnya anggaran yang akuntabel.

Dari sasaran strategis tersebut, dijabarkan ke dalam Sasaran Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan indikatornya tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- SP 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dalam negeri, dengan indikator sebagai berikut :
 - 1. Peningkatan produksi padi
 - 2. Peningkatan produksi jagung
 - 3. Peningkatan produksi kedelai
- SP 2: Meningkatnya Ketersediaan Pangan Lokal Non Beras; dengan indikator sebagai berikut :
 - 4. Peningkatan Produksi Aneka Umbi
 - 5. Peningkatan Produksi Aneka Kacang
- SP 3 : Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Pangan; dengan indikator sebagai berikut :
 - 6. Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT.
 - 7. Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI
- SP 4: Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Tanaman Pangan; dengan indikator sebagai berikut :

8. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

SP 5 : Meningkatnya Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan; dengan indikator sebagai berikut :

9. Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan;

SP 6 : Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dengan indikator sebagai berikut :

10. Nilai PMPRB (pengungkit) Ditjen Tanaman Pangan.

SP 7 : Terkelolanya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang Akuntabel; dengan indikator sebagai berikut :

11. Nilai Kinerja (NK).



Gambar 4. Peta Strategis Kementerian_Ditjen Tanaman Pangan



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.1.1. Agenda Pembangunan

Arahan utama presiden : untuk agenda pembangunan yaitu :

- 1. Pembangunan SDM**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

- 2. Pembangunan Infrastruktur**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

- 3. Penyederhanaan Regulasi**

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

- 4. Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan

lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Kementerian Pertanian fokus dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

RPJMN Tahun 2020-2025 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.” Pada RPJMN ke empat (2020-2025), masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2020 – 2024 pada Prioritas Nasional 1 yaitu penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan terdiri dari 8 program prioritas yaitu :

1. Program Prioritas 1; Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan energy baru terbarukan (EBT);

2. Program Prioritas 2 ; Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Program Prioritas 3 ; Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
4. Program Prioritas 4; Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
5. Program Prioritas 5, Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
6. Program Prioritas 6, Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
7. Program Prioritas 7, Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
8. Program Prioritas 8, Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Dari ke 8 (delapan) Program Prioritas tersebut yang menjadi prioritas Kementerian Pertanian yaitu PP3. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan PP6. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Indikator kinerja dan target program prioritas tahun 2020 – 2024 sektor pangan dan pertanian dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran dan indikator PP 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi pangan

PP/KP	Indikator	Baseline	Target		K/L yang Terlibat
		2019	2020	2024	
KP 1 Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, ketersediaan dan biofortifikasi pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	99	70	85-95	Kementerian
	Lama lalin produk beras biofortifikasi (hari)	195	11.000	200.000	Kementerian
	Akses terhadap beras biofortifikasi dan terdistribusi lagi ke rumah-rumah yang kurang mampu dan kurang gizi (persentase TPMT)	480.000	20	100% persentase 3797	Kementerian, Kementerian, Proling
	Persentase pangan pangan organik (%)	1	5	20	Kementerian, Kementerian
KP 2 Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan	Penggunaan lahan berproduktif (%)	53	60	60	Kementerian
	Ketersediaan beras (juta ton)	38,4	39,2	44,8	Kementerian, Bidad, Kementerian
	Ketersediaan protein hewani (juta ton)	2,4	2,5	2,9	Kementerian, KPP
	Produksi Jagung (juta ton)	24,5	30,9	35,3	Kementerian
	Produksi Jagung (juta ton)	5,8	4,1	4,9	Kementerian
	Produksi Cattle (santan (juta ton))	35,3	24,3	21,5	Kementerian
KP 3 Peningkatan produktivitas dan sosial ekonomi sumber daya manusia (SDM) pertanian	Milai tambah per tenaga kerja pertanian (Rp/juta/ tenaga kerja (2.3.1*))	46,9	49,3	59,9	Kementerian, Kementerian
	Nilai Tambah Petani	100	100	100	Kementerian
	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)	65	65-80	80-85	Kementerian
KP 4 Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian	Persentase lahan baku sawah yang diterapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	50	50	100	Kementerian
	Jumlah petani yang menanam dan menjual produk pangan yang dilepon (1.5.1*) (Varietas Unggul Baru dan Galur Semai)	30.115 dan 830.000 dan 830.000 dan 830.000	0 dan 0 dan 0	0 dan 0 dan 0	Kementerian, KPP, KPP
	Sumber daya produksi tanaman dan hewan sumber pangan yang terakumulasi (t/ha/ha)	4.250	4.250	4.250	Kementerian, KPP
	Global food security index	67,6	64,1	64,8	Kementerian, KPP, Kementerian, KPP

Tabel 7. Sasaran dan indikator PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

PP/KP	Indikator	Baseline	Target		K/L yang Terlibat
		2019	2020	2024	
PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian	3,5 ^a	3,7	4,1	Kementerian
KP Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terintegrasi hulu-hilir	Pertumbuhan PDB Perkebunan (%)	4,9	4,9	5	Kementerian
	Peningkatan Produksi Kelapa (%)	1,7	2,1	2,7	Kementerian
	Peningkatan Produksi Kopi (%)	1,4	1,4	1,5	Kementerian
	Peningkatan Produksi Kelapa Sawit (%)	5,7	5,8	6	Kementerian
	Pertumbuhan PDB Hortikultura (%)	3,8	5,88	6	Kementerian
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Ekspor hasil pertanian (POB) (US\$ Miliar)	12	4	5,5	Kementerian

8. PN 3 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas (PP) pada PN 3 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti;

(5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) jumlah produk inovasi dari *tenant* perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

3.1.2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Nasional

Untuk lebih memfokuskan lagi terhadap agenda pembangunan sebagaimana paragraf diatas maka dalam RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/ Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung *Major Project* yaitu :

- a. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
Dasar hukum pelaksanaan Korporasi petani yaitu merupakan arahan langsung dari Presiden Bapak Joko Widodo yaitu :

- Ratas 12 September 2017 “mengkorporasikan petani” Pemerintah perlu mendorong petani berkelompok sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien, manajemen yang modern, dan pemasaran.
- Tanggal 23 Oktober 2019 “pengukuhan Menteri” Salah satu tugas Menteri Pertanian adalah mewujudkan korporasi petani.
- Ratas 10 Desember 2019 “akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan” Pemerintah perlu mendorong petani dan nelayan untuk bergabung dalam kelompok/korporasi besar agar lebih efektif dalam mengakses bahan baku, modal kerja dan investasi.
- Ratas 6 Oktober 2020 “KPN dalam mewujudkan transformasi ekonomi” Terdapat 6 poin arahan Presiden terkait pertumbuhan ekonomi Sek. pertanian, KPN, pola pikir off-farm, model bisnis KPN, Peran BUMN Swasta BUMD, dan ekosistem bisnis.

Arahan tersebut dilegalkan ke dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp. 59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

Tabel 8. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

[illegible]

Berdasarkan kesepakatan bersama dengan Sekretaris Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (29 Januari 2021) Diusulkan 2 lokasi percontohan yaitu :

- KP Kopi PT. Java Preanger Lestari Mandiri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk komoditas Kopi;
- KP Padi KSU Citra Kinaraya Demak, Jawa Tengah untuk komoditas padi.

Berdasarkan rapat penetapan calon lokasi Major Project Korporasi Petani Tahun 2021 (Bandung, 5 Maret 2021) Dilakukan penambahan satu lokasi percontohan yakni

- KP Tani Mulus Indramayu untuk komoditas padi
- KP Padi KSU Citra Kinaraya Demak, Jawa Tengah untuk komoditas padi.

Diharapkan dengan menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya dapat di copy ke wilayah lain sehingga tercapai sesuai target di RPJMN 2020-2024.

- b. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 49 juta ton per tahun, yang juga merupakan ekspor komoditas andalan saat ini. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%, meningkatkan produksi bahan bakar nabati dan nilai tambah hasil perkebunan. Pada tahun 2024 ditargetkan produksi kelapa sawit sebesar 50,4 juta ton CPO. Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Kementan mendukung dalam hal akselerasi, replanting, penerapan Good

Agricultural Practices (GAP), dan pengolahan sawit rakyat.

- c. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendukung Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024 pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan prioritas komoditas kakao dan kopi.

- d. Kawasan Sentra Produksi Pangan (IKSP)/ Pengembangan *Food Estate*

Pengembangan Food Estate merupakan arahan dari Presiden RI untuk mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemic Covid-19, mengantisipasi perubahan iklim, mengurangi ketergantungan impor pangan. Dalam UU 18 TAHUN 2012 tentang pangan pada pasal 12 nomor 5 huruf f disebutkan bahwa membangun kawasan sentra produksi pangan. Hal ini semakin memperjelas pentingnya membangun kawasan sentra pangan.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendukung kegiatan prioritas Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan dan Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Dukungan terhadap kegiatan prioritas tersebut dijabarkan kedalam tiga program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu :

- Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Nilai tambah dan daya saing industri,
- Dukungan manajemen.

Beberapa proyek Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk mendukung program tersebut diantaranya yaitu *Food Estate* berbasis korporasi petani yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap perwujudan ketersediaan pangan dan memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan surat perintah Menteri Pertanian nomor 156/KP.410/M/10/2020 bahwa dalam rangka peningkatan produksi mengantisipasi kekurangan pangan akibat pandemic Covid-19, diantaranya dilakukan melalui pengembangan *Food Estate* Kabupaten Sumba dan Kabupaten Buru, penambahan luas pertanaman serta pengamanan produksi dari gangguan OPT dan penanganan DPI menghadapi la nina.

Pengembangan *Food Estate* selanjutnya akan diperluas di beberapa wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan dengan tahapan wilayah tersebut mengusulkan kegiatan, kemudian tim Kementan yang berwenang akan melakukan identifikasi kelayakan.

Pengembangan *Food Estate* dilakukan dengan pendekatan kawasan. Kawasan *Food Estate* merupakan pertanian yang mengusahakan pertanian berskala besar berbasis kluster multi komoditas (pangan, hortikultura, ternak, perkebunan) yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan didukung dengan pengembangan infrastruktur dan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman melalui penerapan teknologi pertanian moderen dan teknologi berbasis digital. Pengelolaan Kawasan *Food Estate* dengan berbasis korporasi.

Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani adalah kawasan *food estate* yang dikembangkan dengan pendekatan mengubah pola pikir, sikap dan perilaku petani dalam mengelola kelembagaan usaha ekonomi secara maju, mandiri dan moderen yang berkelanjutan dan terkonsolidasi lintas wilayah dan lintas sektoral. Secara umum, penentuan lokasi kegiatan *food estate* didasarkan kepada: 1) Aspek kesesuaian lahan, dan/atau kondisi eksisting budidaya di lokasi yang akan dikembangkan; 2) Status lahan *Clear* dan *Clean*

serta tidak dalam sengketa; 3) Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat; 4) Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS - BB/BT); dan 5) Tidak ada ganti rugi lahan terhadap lokasi yang akan dikembangkan.

Pembiayaan berupa modal investasi dan modal kerja untuk operasional *food estate* bersumber dari investasi Pemerintah, Swasta, BUMN, Lembaga Pembiayaan/Perbankan, investasi masyarakat, pemanfaatan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau kerjasama Pemerintah dan swasta, pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, *Municipal Development Fund* (MDF), serta penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah.

3.1.3. Pengarusutamaan

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif. Pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut.

a. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesatuan dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Kemajuan pada suatu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga berkewajiban melaksanakan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi di perdesaan berhubungan dengan pertanian, bahkan pertanian diharapkan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan kelaparan dengan peningkatan akses pangan masyarakat.

Peran penting sektor pertanian dalam program SDGs terlihat dari 17 goals dan 169 target yang menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, disamping perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan kelestarian lingkungan. Beberapa hal diantaranya tentu berhubungan langsung dengan pangan dan pertanian.

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan. Program *Sustainable Development Goals*

(SDG's) yakni untuk kesejahteraan manusia yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan. *No Poverty* dan *Zero Hunger*. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu faktor utama rendahnya akses masyarakat terhadap pangan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, sekitar 20 juta penduduk mengalami kelaparan setiap harinya.

b. Pengarusutamaan gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

c. Modal sosial budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus

menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pertanian erat kaitannya dengan pengembangan sosial dan budaya masyarakat, budaya gotong royong, mapalus dan subak merupakan contoh modal sosial yang perlu untuk diperkuat dalam meningkatkan partisipasi dan kepemilikan terhadap program pembangunan pertanian, termasuk berbagai jenis praktik budidaya konservasi yang dilaksanakan secara turun temurun dapat dijadikan sebagai bagian dari pengarusutamaan modal sosial budaya di sektor pertanian.

d. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE, termasuk penataan

sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta pengembangan dan peningkatan usaha melalui *e-commerce*.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN DAN DITJEN TANAMAN PANGAN

1.2.1. Arah Kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah yang didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan

pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/ penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian.

Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Budidaya Pangan Berkelanjutan, pencapaian

ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing.

Pembangunan jangka menengah 2020-2024, sesuai target nasional yang didukung oleh sektor pertanian bahwasanya tidak ada lagi visi misi K/L dan hanya ada Visi Misi Presiden menjadikan ruang lingkup dukungan sektor pertanian dalam pembangunan nasional semakin meluas diantaranya:

1. Peningkatan investasi pertanian
2. Peningkatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Peningkatan produksi komoditas pertanian
4. Penurunan tingkat kehilangan hasil (*losses*)
5. Peningkatan efisiensi biaya produksi
6. Dukungan terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan pengusaha pertanian milenial
7. Peningkatan ekspor komoditas dan hasil pertanian
8. Penurunan daerah rawan pangan dan *stunting*
9. Family farming dan pertanian masuk sekolah (dunia pendidikan)
10. Pemanfaatan dan pengembangan pertanian dalam kluster daerah utama, andalan dan pengembangan.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani

dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka **Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:**

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian,
5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dan
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian. Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan *research and development* (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas (*yield*) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan

biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik).

Berdasarkan fokus kebijakan Kementerian Pertanian tersebut, apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaga ketahanan pangan nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar sehingga dapat mewujudkan kemandirian pangan.

Strategi utama untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian pangan adalah pengembangan penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan fungsional secara tersistem dari hulu ke hilir secara dinamis dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini berbagai regulasi terkait perlu disempurnakan dan dikembangkan. Investasi perlu diarahkan secara proporsional, baik di sektor ekonomi maupun sosial dengan mempertimbangkan daya ungkit kebijakan dan program lainnya seperti peningkatan kesempatan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta peningkatan penyediaan dan ekspor pangan. Pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan membutuhkan pendekatan teknologi, ekonomi, sosial (termasuk budaya), dan lingkungan secara sinergis.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya:

a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian

Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah:

- Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik.
- Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (*Good Agricultural Practice, Good Handling Practice dan Good Manufacturing Practice*)
- Mengurangi kehilangan hasil panen (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*)
- Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim
- Mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani
- Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian
- Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa
- Meningkatkan populasi hewan ternak
- Mengembangkan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman-ternak)

- Menerapkan pertanian presisi/ digitalisasi pertanian.
- b. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah operasional sebagai berikut:
 - Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan
 - Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*)
 - Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi
 - Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan
- c. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan
 - Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah
 - Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat

- Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan
 - Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
- Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu:
- a. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air melalui:
- Audit lahan pertanian
 - Meningkatkan luas areal pertanian
 - Menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan
 - Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif
 - Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar

- Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marginal
 - Optimalisasi sumberdaya air yang existing dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan
 - Peningkatan fungsi prasarana irigasi
 - Penerapan teknologi hemat air
 - Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam parit (*long storage*).
 - Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan.
- b. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya melalui:
- Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat (KUR)
 - Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis
 - Fasilitasi program asuransi pertanian.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida melalui:
- Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
 - Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih
 - Penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan
 - Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi
 - Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan

- Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- d. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian melalui:
 - Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan
 - Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman
 - Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan
 - Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri
 - Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan
 - Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah
 - Menyediakan sistem pembiayaan/ perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan
 - Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan
 - Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan.
- 3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai

tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan nilai tambah melalui

- Pengembangan dan penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar
- Penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen dan pemasaran di tingkat petani/keompok tani
- Hilirisasi inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri
- Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian
- Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani
- Pengembangan *cold storage* dan silo untuk komoditas strategis
- Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian
- Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan.

b. Peningkatan daya saing pertanian

Peningkatan daya saing pertanian melalui :

- Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan
- Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan ekspor dan investasi

- Penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor
- Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan
- Diplomasi pengenaan Tarif *Preferensi Free Trade Area (FTA)*
- Penyelesaian sengketa dagang
- Peningkatan akses pasar ekspor (*non-traditional market*)
- Penguatan *Market Intelligence* di luar negeri
- Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (*One Single Submission*) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.
- Mendorong generasi millennial untuk menjadi eksportir
- Penerapan *inline inspection* yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor.
- Percepatan Program I-Mace (*Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export*) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor.

- Penerapan elektronik sertifikat (E-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin
- Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor
- Penyiapan *pest list* untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan
- Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses
- Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor.

4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Pencapaian sasaran pembangunan pertanian melalui peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong penciptaan teknologi inovatif pertanian secara terpadu melalui
 - Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai pihak (lembaga penelitian pertanian dan pengguna) secara berkelanjutan
 - Sinkronisasi dan sinergitas program penelitian, pengkajian, dan diseminasi dengan program penyuluhan pertanian

- Meningkatkan kualitas benih/bibit unggul hasil penelitian dan pengembangan
 - Peningkatan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan dalam penetapan skala prioritas kawasan pertanian
 - Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian.
- b. Mendorong pengembangan teknologi inovatif melalui
- Pengembangan teknologi inovatif yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
 - Penguatan sinergi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian
 - Pengembangan pertanian presisi dan digitalisasi pertanian
 - Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan
 - Menumbuhkembangkan industri serta kelembagaan pengujian alsintan terakreditasi.
- c. Mengembangkan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi melalui
- Pengkajian teknologi inovatif pertanian spesifik lokasi
 - Pengembangan teknologi hemat air/pertanian presisi

- Pengembangan teknologi dan penerapan alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman
 - Penguatan/modernisasi unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen
 - Pengembangan kajian teknologi inovatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat antisipatif dan responsif bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah
- d. Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif melalui
- Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna
 - Penguatan pengelolaan alih teknologi pertanian melalui akselerasi komersialisasi hasil litbang
 - Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri
 - Peningkatan efektifitas pendampingan dan pengawalan teknologi inovatif mendukung program strategis kementan.

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian melalui

- Menstandarkan semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO 9001: 2015
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan
 - Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar
 - Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta
 - Memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital.
- b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian melalui
- Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta
 - Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/ pengawalan pembangunan pertanian
 - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani

- Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian.
- c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui
 - Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan *e-learning*
 - Pengembangan *database* penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh
 - Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian
- d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional melalui
 - Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional
 - Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional
 - Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara
- e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi melalui
 - Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan avokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing
 - Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja

- Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian
 - f. Penguatan kelembagaan petani melalui
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/ BUMP Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha
 - Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani
 - Peningkatan skala ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUB) petani muda.
 - 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima
- Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan serta pelayanan publik. Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:
- a. Penguatan implementasi manajemen ASN
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
 - d. Transformasi pelayanan publik

7. Strategi untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian di masa dan pasca pandemi Covid-19

Kegiatan utama dan kegiatan terobosan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian di masa dan pasca pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kegiatan Utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian

No	Program	Kegiatan Utama	Kegiatan Terobosan
1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Peningkatan Produktivitas dan Produksi (IP dan Ekstensifikasi) 2. Pengembangan Pangan Lokal (Singkong, Talas, Sagu, Kentang, Pisang) 3. Pengembangan Lumbung Pangan Provinsi, Kab/ Kota, Kec, Desa 4. Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming	1. Pengembangan Food Estate (FE) di Berbagai Agroekosistem 2. Perluasan Areal Tanam dan IP 400 3. Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura (Kampung Buah, Sayuran, Tanamania Hias, Tanaman Obat) 4. Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor 5. Pengembangan 1 juta Alsintan 6. Pengembangan jaringan irigasi tetes berbasis digital 7. Pengembangan Lembaga Pangan Masyarakat (Kecamatan/Desa)

No	Program	Kegiatan Utama	Kegiatan Terobosan
			8. Pekarangan Pangan Lestari (PPL) 9. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/ TTIC) 10. Penguatan jejaring Distribusi Pangan melalui Kemitraan dengan <i>e-commerce</i> 11. Pengembangan dan pemanfaatan <i>screen house</i> hortikultura 12. Pengembangan Bank Pakan 13. Padat Karya Pertanian
2	Program Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri	1. Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024) 2. Peningkatan Hilirisasi/Industri Produk Pertanian 3. Pengembangan Pertanian Modern	1. Pengembangan 350 Korporasi Petani (Pangan, Horti, Perkebunan, Peternakan) berorientasi ekspor 2. Pengembangan Nursery Perbenihan Kopi, Kelapa dan Jambu Mete 3. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) 4. Pengembangan Komoditas Porang 5. Pengembangan Seribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet 6. Pengembangan 1 juta Alsintan Pasca panen dan Pengolahan 7. Percepatan Implementasi I-Mace dan sertifikasi Perkarantina

No	Program	Kegiatan Utama	Kegiatan Terobosan
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Penciptaan dan Pengembangan Varietas Unggul 2. Penciptaan dan Pengembangan Inovasi Teknologi Breeding, Pasca panen, Pengolahan dan Inovasi Pasar	1. Pengembangan Benih/Bibit Unggul berkualitas 2. Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi melalui Percontohan 3. Pengembangan Pertanian Presisi dan digitalisasi pertanian 4. Pengembangan Mekanisasi Alsintan nirawak 5. Pengembangan hilirisasi/ industrialisasi hasil-hasil penelitian
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian 2. Penguatan Kapasitas kelembagaan Petani	1. Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial 2. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan korporasi petani 3. Pengembangan BPP Kostratani
5	Dukungan Manajemen	1. Pengembangan AWR (Digitalisasi, IoT, AI, Robot Construction) 2. Reformasi Birokrasi	1. Penguatan Satu Data Pertanian 2. Pengembangan Koordinasi Pembangunan Pertanian dalam satu Komando (Kostratan) 3. Perampingan Struktur Organisasi dan Percepatan Transformasi Struktural Ke Fungsional

Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Grati eks).



Gambar 5. Pendekatan Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian, Tahun 2020-2024

Deskripsi secara ringkas dari kelima CB tersebut diuraikan berikut ini:

1. Cara Bertindak 1 (satu): Peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas

Upaya peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan rawa yang difokuskan di Kalimantan Tengah untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu. Perluasan areal tanam baru untuk komoditas strategis terutama bawang merah, bawang putih dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih defisit dilaksanakan di Sumatera Utara, serta peningkatan produksi dalam negeri untuk gula dan daging sapi untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

2. Cara Bertindak 2 (dua) : Peningkatan diversifikasi pangan lokal

Peningkatan diversifikasi pangan lokal dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Peningkatan pangan sumber karbohidrat dilakukan secara masif sesuai dengan potensi wilayah dan preferensi masyarakat, dengan pengembangan dan pemanfaatan ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum. Upaya peningkatan penyediaan pangan dan gizi dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekitar rumah melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui dua kegiatan ini, Kementerian Pertanian mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan nasional.

3. Cara Bertindak 3 (tiga) : Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan

Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik. Upaya ini dilakukan dengan: (1) Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), (2) penguatan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK); (3) pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) berbasis komunitas dan LPM Berbasis Desa (LPMDes), (4) pengembangan kerja sama LPM dengan Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling) di setiap lumbung pangan kecamatan, dan (5) penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

4. Cara Bertindak 4 (empat) : Modernisasi pertanian

Upaya modernisasi pertanian tetap harus dilanjutkan terutama untuk mengurangi interaksi antar pelaku usaha dalam kerangka pencegahan penularan Covid-19, disamping tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Pengembangan pertanian modern dilakukan dengan (1) pengembangan pertanian presisi/ *smart farming*, (2) pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi

tinggi), (3) pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Provinsi Kalimantan Tengah, dan (4) pengembangan korporasi petani.

5. Cara Bertindak 5 (lima): Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks)

Berkaitan dengan gerakan ekspor tiga kali lipat, upaya yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait, (2) menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian, (3) mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan *agropreneur*, dan (4) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerja sama bilateral/multilateral.

3.2.2. Arah kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 pada prinsipnya mendukung Prioritas Program (PP) 3 yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Program ini terdiri dari Kegiatan Prioritas (KP) yaitu :

KP 1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan

Berisikan indikator luas lahan produksi beras biofortifikasi (Ha).

KP 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara

berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok

Berisikan empat indikator kegiatan prioritas yang terdiri dari (1) penggunaan benih bersertifikat (%); (2) ketersediaan beras (juta ton); (3) produksi jagung (juta ton); dan (4) produksi umbi-umbian (juta ton).

Untuk melihat lebih rinci kegiatan prioritas yang mendukung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam RPJMN 2020-2024 lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Indikator Pangan dan Pertanian RPJMN 2020-2024

Indikator	Sub-indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.1 Indikator ketersediaan beras	Produksi beras (juta ton)	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
	Produksi beras (juta ton)	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
	Produksi beras (juta ton)	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
	Produksi beras (juta ton)	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
	Produksi beras (juta ton)	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
1.2 Indikator ketersediaan jagung	Produksi jagung (juta ton)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Produksi jagung (juta ton)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Produksi jagung (juta ton)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Produksi jagung (juta ton)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Produksi jagung (juta ton)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1.3 Indikator ketersediaan umbi-umbian	Produksi umbi-umbian (juta ton)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Produksi umbi-umbian (juta ton)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Produksi umbi-umbian (juta ton)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Produksi umbi-umbian (juta ton)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Produksi umbi-umbian (juta ton)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Dalam rangka operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendukung program prioritas dan kegiatan prioritas, telah ditetapkan kegiatan mendukung kebijakan tersebut yaitu :

1. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan
3. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan (terdiri dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura)
4. Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan (terdiri dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan)
5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
6. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan tersebut dikelola unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kebijakan pertanian terutama sektor tanaman pangan dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung

pembangunan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional

Dalam mendukung terjaganya ketahanan pangan nasional, maka harus dijaga ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dalam negeri.

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan yaitu meningkatnya produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung, kedelai ;, meningkatnya ketersediaan pangan lokal non beras (aneka umbi, aneka kacang);, Ketersediaan varietas unggul bersertifikat sesuai kebutuhan;, terkendalinya serangan OPT dan dampak terkena DPI.

2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian

3. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan nilai tambah komoditas tanaman pangan yaitu meningkatnya nilai tambah komoditas tanaman pangan dengan peningkatan kemanfaatan alat mesin pertanian pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, meningkatnya daya saing komoditas tanaman pangan yaitu dengan Peningkatan ekspor subsektor tanaman pangan.

4. Pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani

Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah dimanatkan dalam perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN bahwa Dalam RPJM 2020-2024, pengembangan kawasan korporasi pertanian sebagai Penguatan Jaminan Usaha serta 350

korporasi petani dan nelayan dengan pelaksana kegiatan Kementan, KKP, Kemen BUMN, Kemenkop UKM, Kemenperin, BUMN/Swasta, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya. Di Kementerian Pertanian telah dikategorikan kawasan yaitu kawasan Pertanian utama, andalan, dan pengembangan yang dijadikan sebagai calon lokasi major project kawasan pertanian Sasaran terbentuknya pengembangan kawasan korporasi pertanian pada tahun 2020-2024:

- Tahun 2020 = terbentuk 5 kawasan
- Tahun 2021 = terbentuk 33 kawasan
- Tahun 2022 = terbentuk 65 kawasan
- Tahun 2023 = terbentuk 150 kawasan
- Tahun 2024 = terbentuk 350 kawasan.

Target tersebut merupakan korporasi Kementerian pertanian yang terdiri dari komoditas prioritas berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan Kepmentan 472 tahun 2018. Komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, dan porang.

5. Pengembangan Food Estate.
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis tanaman pangan

Meningkatkan ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dengan melalui pendekatan peningkatan produksi khususnya komoditas padi, jagung dan kedelai. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan benih unggul peningkatan sertifikasi perbenihan, penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (*Good Agricultural Practice*).

Strategi Peningkatan produksi tanaman pangan dengan meningkatkan produktivitas dan luas panen. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah luas lahan intensifikasi/ optimalisasi melalui penggunaan benih unggul/bermutu/bersertifikat, pemupukan berimbang, pengendalian OPT dan DPI. Peningkatan luas panen melalui peningkatan luas lahan ekstensifikasi / perluasan areal pertanian.

Selain itu peningkatan produksi dapat dicapai dengan pendekatan Pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani, tumpangsari, pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian, pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa dan Pengembangan system pertanian terpadu *integrated farming*.

Perubahan iklim yang semakin tidak menentu sangat mempengaruhi peningkatan produksi, banyak petani gagal panen/puso karena

kekeringan dan banjir. Strategi yang ditempuh dalam adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu:

- a. Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim.
- c. Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik.
- d. Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rembug petani di tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi kalender tanam dan antisipasi terhadap perubahan iklim.

Dukungan Direktorat Jenderal tanaman pangan dalam peningkatan produksi yaitu memberikan regulasi dan bantuan pemerintah yang bersifat stimulant. Bantuan pemerintah berupa fasilitasi sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, herbisida, alat mesin pertanian, sarana DPI yaitu sumur, pompa dll, serta sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

2. Meningkatkan produksi tanaman pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti porang dan tanaman pangan lain seperti aneka kacang dan umbi, dan sereal. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung gerakan peningkatan ekspor dan peningkatan pendapatan petani.
3. Peningkatan daya saing tanaman pangan
 - a. Peningkatan daya saing dengan mengurangi kehilangan susut hasil dengan penanganan

panen dan pasca panen yang benar (*Good Handling Practice*);

- b. Peningkatan mutu dan daya saing dengan pengolahan yang benar (*Good Manufacturing Practice*);
- c. Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan
- d. Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan ekspor dan investasi
- e. Penguatan sistem perkarantinaan guna mendukung percepatan ekspor
- f. Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan dengan cara: Mengurangi Komoditi yang Wajib Laporan Surveyor (LS), Mengurangi larangan dan/atau pembatasan Ekspor lainnya, Memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin, dan Efisiensi logistic.
- g. Diplomasi pengenaan *Tarif Preferensi Free Trade Area* (FTA)
- h. Penyelesaian sengketa dagang
- i. peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market)
- j. Penguatan *Market Intelligence* di luar negeri
- k. Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (*one single system*) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.
- l. Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir

- m. Pemerintah membuat kebijakan *inline inspection* yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor.
- n. Program I-Mace (Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor.
- o. Penerapan elektronik sertifikat (E-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin
- p. Mendorong KUR komoditas berorientasi ekspor
- q. Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan
- r. Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses
- s. Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor;
- t. Kemitraan (pembiayaan maupun pembinaan, pemasaran).

4. Peningkatan infrastruktur pertanian pasca panen
Penggunaan alsintan Pasca panen dimaksudkan untuk peningkatan produksi loses dan mutu hasil tanaman pangan. Peningkatan penggunaan alsintan dengan melalui strategi sebagai berikut :
 - a. Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan
 - b. Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman
 - c. Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan
 - d. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri
 - e. Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan
 - f. Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah
 - g. Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan
 - h. Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan
 - i. Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan.
5. Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penerapan manajemen talenta ASN
 - b. Peningkatan sistem merit ASN
 - c. Penyederhanaan eselonisasi
 - d. Penataan jabatan fungsional
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah
 - b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi

3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - a. Perluasan implementasi sistem integritas
 - b. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
 - c. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
4. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - a. Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*)
 - b. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
 - c. Penguatan ekosistem inovasi
 - d. Penguatan pelayanan terpadu.
6. Meningkatkan pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang akuntabel dan berkualitas.
7. Meningkatkan dukungan kegiatan-kegiatan tematik
Pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dalam upaya pencapaian sasaran nasional 2020-2024 membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dalam hal dukungan kegiatan, penganggaran, regulasi, kebijakan, maupun faktor lainnya dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang berinteraksi langsung ataupun tidak langsung terhadap program/kegiatan yang sudah dicanangkan.

Selain rancangan program/kegiatan tahun 2020-2024 yang sudah ditetapkan, selain kegiatan utama juga terdapat kegiatan khusus atau tematik yang didasari atas regulasi atau peraturan Pemerintah, integrasi kegiatan lintas unit kerja, maupun kegiatan kebijakan pimpinan yang dialokasikan untuk disinergikan dan diintegrasikan dengan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Dukungan dari sub sektor tanaman pangan dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi petani dari hulu hingga hilir pada komoditas unggulan setempat. Pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (*THIS*). Tematik dalam pendekatan tersebut bermaksud penentuan tema-tema prioritas dengan kesesuaian tema, holistik untuk pencapaian prioritas melalui koordinasi berbagai elemen pemangku kepentingan, integratif bermakna relasi antar-berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas, serta spasial berarti dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas.

Kegiatan tematik dapat diaplikasikan dalam bentuk dukungan terhadap sarana produksi tanaman pangan dari hilir hingga hulu, pendampingan/pengawasan kegiatan dan

pembiayaan (*KUR*) tanaman pangan, sehingga berdampak langsung kepada petani maupun masyarakat sekitarnya. Dampak nyata yang diharapkan melalui dukungan kegiatan tematik meliputi ketersediaan pangan lokal, optimalisasi komoditas unggulan, akses pemasaran produk yang bernilai daya saing, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kegiatan tematik yang menjadi kegiatan prioritas pada RPJMN Kementerian/Lembaga Pemerintah selain Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 meliputi kawasan perbatasan (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan/BNPP); daerah tertinggal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi); Pengarusutamaan Gender (*PUG*) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA) Rencana Aksi Nasional (RAN) Bela Negara; Rencana Aksi Pemberantasan Narkoba (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas); dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) (TNI-RI).

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan mensinergikan dan mengintegrasikan kegiatan dan anggaran yang dianggarkan pada RPJMN 2020-2024 dengan kegiatan tematik tersebut. Alokasi dukungan setiap tahunnya untuk kegiatan selain PUG

disesuaikan dengan lokasi prioritas (lokpri) yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, namun tidak seluruh lokpri akan diakomodir setiap tahunnya. Untuk kegiatan PUG pada tahun sebelumnya terdapat pada kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) (Ditlintan), dan tahun 2020-2024 akan diterapkan juga pada kegiatan perbenihan, budidaya tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

8. Strategi Penyerapan KUR

Kementerian Pertanian mendorong peningkatan penyaluran KUR bidang pertanian. Diharapkan dengan KUR permasalahan pembiayaan/modal petani dapat teratasi sehingga menumbuhkan kemandirian petani dalam hal pembiayaan. Strategi transformasi penyerapan KUR diantaranya dilakukan melalui peningkatan alokasi KUR dengan memberikan insentif kepada petani terintegrasi dengan program bantuan Kementan, inisiasi alokasi KUR dengan Skema *Off taker*, pendampingan dan monitoring kepada off taker, petani dan lembaga penyalur, harmonisasi pedoman pelaksanaan KUR dengan Kementerian lintas sektoral/lembaga terkait serta perluasan

media *coverage* yaitu publikasi terkait sosialisasi bagaimana tata cara pengajuan dan manfaat dari KUR.

9. Padat karya

Kegiatan Padat Karya yang merupakan salah satu langkah nyata dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produksi atau menjamin ketersediaan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat menarik minat pemuda tani untuk semangat terus dalam berkontribusi bidang pertanian tanaman pangan karena pemerintah melibatkan mereka dalam kegiatan pembangunan pertanian. Fokus utama program padat karya pertanian yaitu pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian lainnya yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat. Selain itu padat karya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung gerakan tanam, panen, pengendalian OPT dan penanganan DPI di wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan.

10. Pengembangan *Agricultural War Room* (AWR) dan satu data pertanian.

3.3. KERANGKA REGULASI

Urgensi kerangka regulasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Mengarahkan perencanaan regulasi sebagai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kuantitas penggunaan anggaran untuk pembentukan regulasi,
3. Meningkatkan kualitas Regulasi dalam rangka mendorong prioritas pembangunan nasional.

Sedangkan Prinsip-Prinsip Regulasi yang akan dilaksanakan pada RPJMN 2020-2024 antara lain:

1. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur,
2. Mempertimbangkan aspek-aspek biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis/CBA*),
3. Kebutuhan regulasi dalam RKP dan Renja mendukung kebijakan pembangunan nasional dan arahan presiden,
4. Peningkatan pemangku kepentingan.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional antara lain:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Infrastruktur dan pemetaan wilayah,
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja,
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup,
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian diantaranya:

1. RPermentan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. RPermentan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
3. Terjaganya ketahanan pangan nasional, regulasi yang dibutuhkan antara lain:
 - a. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
 - b. RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. RPermentan tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik; dan
 - d. RPermentan tentang Komando Strategi Penggilingan Padi.
4. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya:
 - a. RPerpres Pengembangan Tanaman Obat/Jamu untuk Industri
 - b. RPermentan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - c. Rpermentan tentang Penerapan Penanganan dan Pemasaran Biji Kakao.
5. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan saran pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya:
 - a. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

- b. RPerpres tentang Asuransi Pertanian;
 - c. RPermentan tentang Perlindungan Perkebunan;
 - d. RPermentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
 - e. Rpermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.
6. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya:
- a. RPerpres tentang Optimalisasi Penyuluhan Pertanian.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peratran Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi,

- jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
 - e. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
 - f. koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
 - g. pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
 - k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Susunan Organisasi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

- j. Badan Ketahanan Pangan;
- k. Badan Karantina Pertanian;
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
- m. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- n. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- o. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
- p. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
- q. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
- r. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
- s. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
- t. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.



Gambar 6. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan;
 - pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
 - evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
 - evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan; dan

- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- Bagian Umum;
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta pelayanan rekomendasi.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain.-

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Direktorat Serealia

Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.

Direktorat Serealia menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
- pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan sereal lain; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sereal.

Direktorat Sereal terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
- pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain; dan

- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu

tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,

standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;

- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
- koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman bahwa kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Balai tersebut sebagai berikut :

1. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar POPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Balai Besar POPT secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas Balai Besar POPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi .: peramalan, pengembangan peramalan OPT, .dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji di bidang perlindungan tanaman;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- h. pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar POPT.

Balai Besar POPT terdiri atas :

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Balai Besar PPMBTPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi, pemanfaatan inovasi, pengembangan pengujian mutu benih, serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;

- c. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
- e. pelaksanaan sertifikasi International Seed Testing Association (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan sertifikasi perorangan, sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan dan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Balai Besar PPMBTPH terdiri dari :

- a. Bagian Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

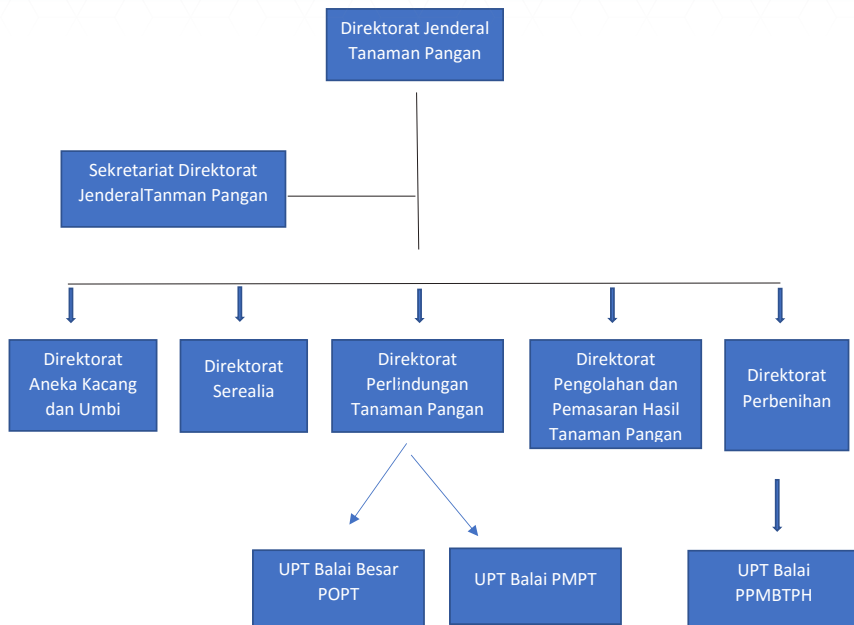
3. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang selanjutnya disebut Balai PMPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Balai PMPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk, produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Balai PMPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sampel pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar, serta produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Balai PMPT terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam periode 2020 - 2024. Target kinerja dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Dalam target kinerja juga telah ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Target kinerja disusun mengacu berdasarkan target kinerja Kementerian Pertanian.

Target Kinerja Kementerian Pertanian dapat dilihat dari sasaran strategis yang merupakan indikator utama Kementerian Pertanian 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;

2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional;
5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, serta anggaran yang akuntabel.

Indikator kinerja utama Kementerian pertanian tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA 2021		SATU-AN 2022	TARGET			
					2023	2024		
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1,81	3,64	4,44	5,34
		2	Peningkatan Akses Pangan	%	3,61	5,17	5,34	5,97
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27	2,27	2,27	2,27
		4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	85,10	85,25	85,35	85,50

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA 2021		SATU-AN 2022	TARGET			
					2023	2024		
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,10	70,20	70,30	70,40
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,50	81	81
		7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang Ditetapkan	%	100	100	100	100
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	42	43	44	45

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA 2021		SATUAN 2022	TARGET			
					2023	2024		
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	56,16	56,77	57,41	58,07
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	86,69	88,14	89,39	90,56
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca-panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	84,40	85,33	86,00	86,90
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	7,71	9,21	10,75	12,28
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	%	70	70	75	75
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	75	80	85	90
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	75	80	85	90

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA 2021		SATU-AN 2022	TARGET			
					2023	2024		
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	19	20	21	22
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	80,71	81,46	82,21	82,96
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,61	91,98	92,36	92,73

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian tersebut, ditetapkan target kinerja/Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dalam negeri, indikatornya :
 - a. Peningkatan Produksi Padi
 - b. Peningkatan Produksi Jagung
 - c. Peningkatan Produksi Kedelai
2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Lokal Non Beras, indikator:
 - a. Peningkatan Produksi Aneka Umbi
 - b. Peningkatan Produksi Aneka Kacang
3. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan, indikatornya :
 - a. Rasio Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT;

- b. Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI;
- 4. Meningkatnya nilai tambah komoditas tanaman pangan, indikatornya :
 - a. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
- 5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan, indikatornya :
 - a. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Tanaman Pangan.
- 6. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, indikatornya :
 - a. Nilai PMPRB (pengungkit) Ditjen Tanaman Pangan;
- 7. Terkelolanya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang Akuntabel, indikatornya :
 - a. Nilai Kinerja (NK).

Target Kinerja/Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel target kinerja sebagai berikut:

Tabel 12. Target Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

PROGRAM/KELOMPOK/SARANAN/INDIKATOR	SATUAN	Basis 2020	Target				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 1. KETERSEDIAAN, ASES DAN SOSIALISASI PANGKAP KEBERKUALITAS							
SARANAN PROGRAM 1.1) Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Strategi Tanaman Pangan Dalam Negeri							
ISIP 1.1.1. Peningkatan Produksi Jagung	%	1,09	2,30	5,00	5,52	8,10	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
— Peningkatan Produksi jagung	%	1,09	2,30	5,00	5,52	8,10	Divisi dan Lahan
— Suku benih jagung berkwalitas yang tersedia sebanyak 1000 ton, seluas 1000 hektar, dan benih yang ditanam 1000 ton	ton	600,0	50,00	12,00	13,00	80,00	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
ISIP 1.1.2. Peningkatan Produksi Jajug	%	1,45	0,25	13,34	15,30	17,67	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
— Peningkatan Produksi jajug	%	1,45	0,25	13,34	15,30	17,67	Divisi dan Lahan
— Suku benih jajug berkwalitas yang tersedia sebanyak 1000 ton, seluas 1000 hektar, dan benih yang ditanam 1000 ton	ton	90,00	31,00	82,00	80,00	91,00	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
ISIP 1.1.3. Peningkatan Produksi Sediak	%	15,28	12,62	19,32	12,21	16,10	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
— Peningkatan Produksi Sediak	%	15,28	12,62	19,32	12,21	16,10	Divisi dan Lahan
— Suku benih sedak berkwalitas yang tersedia sebanyak 1000 ton, seluas 1000 hektar, dan benih yang ditanam 1000 ton	ton	25,00	20,00	10,00	40,00	41,00	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
SARANAN PROGRAM 2.1) Meningkatkan Ketersediaan Pangan Lokal dan Beras							
ISIP 2.1.1. Peningkatan Produksi Kacang Tanah	%	1,40	7,00	6,00	6,00	7,20	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
— Peningkatan Produksi kacang tanah yang tersedia sebanyak 1000 ton, seluas 1000 hektar, dan benih yang ditanam 1000 ton	ton	12	17	17	17	17	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
— Varietas kacang tanah lokal	%	1,75	10,40	10,70	12,21	13,87	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
ISIP 2.1.2. Peningkatan Produksi Kacang Hijau	%	18,70	7,00	7,68	8,70	10,70	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
— Peningkatan Produksi kacang hijau yang tersedia sebanyak 1000 ton, seluas 1000 hektar, dan benih yang ditanam 1000 ton	ton	12	12	12	12	12	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan
— Varietas kacang hijau lokal	%	1,29	0,60	0,68	0,70	0,82	Divisi dan Lahan Tanaman Pangan

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2020	Target				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 1. KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS							
SASARAN PROGRAM 3 : Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan							
IKSP 6 : Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75	75.2	75.4	75.6	75.8	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75	75.2	75.4	75.6	75.8	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
IKSP 7 : Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI	%	60	60.2	60.4	60.6	60.8	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
- Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI	%	60	60.2	60.4	60.6	60.8	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
PROGRAM 2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI							Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
SASARAN PROGRAM 4 : Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Tanaman Pangan							
IKSP 8 : Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	%	85	85.1	85.3	85.5	85.6	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
-Tingkat kemanfaatan alsintan pascapanen Tanaman Pangan	%	85	85.1	85.3	85.5	85.6	Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
SASARAN PROGRAM 5 : Meningkatnya Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan							
IKSP 9 : Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan	%	10	11	12	13	14	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan	%	10	11	12	13	14	Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN							
SASARAN PROGRAM 6 : Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
IKSP 10 : Nilai PMPRB (pengungkit) Ditjen Tanaman Pangan	Nilai	29.93	30.83	31.75	32.71	33.69	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Nilai PMPRB (pengungkit) Ditjen Tanaman Pangan	Nilai	29.93	30.83	31.75	32.71	33.69	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
SASARAN PROGRAM 7 : Terkelolanya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang Akuntabel							
IKSP 11 : Nilai Kinerja (NK)	Nilai	74.25	74.50	75	75.50	76.00	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Nilai Kinerja (NK)	Nilai	74.25	74.50	75.00	75.50	76.00	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Target RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Tabel 13. Target RPJMN 2020-2024 yang terkait Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	195	10,000	50,000	100,000	150,000	200,000
	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan	Penggunaan benih bersertifikat (%)	53	60	65	70	75	80
		Ketersediaan beras (juta ton)	38,4	39,2	42,7	44	45	46,8
		Produksi jagung	24,8	30,9	31,9	33	34,1	35,3
		Produksi umbi-umbian (juta ton)	23,3	24,3	24,6	24,9	25,2	25,5

Tabel 14. Target Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 (Tentative)

Komoditas	Satuan	TARGET (Juta TON)						
		Baseline 2019 rev 1	2020 rev 1	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
Padi (KSA)	Ton GRG	54.00	55.16	54.65	55.80	57.50	60.50	65.40
Padi Biofortifikasi (Gabah)			0.05	0.05	0.25	0.51	0.77	1.05
Padi Biofortifikasi (Teras Tersedia)	Ton		0.03	0.03	0.16	0.32	0.50	0.67
Padi Biofortifikasi (Teras Konsumsi)	Ton		0.03	0.03	0.14	0.29	0.44	0.60
Jagung (KA sekitar 25%)	Juta Ton	22.59	22.92	22.92	23.00	26.00	30.00	35.30
Jagung (KA sekitar 15%)			19.94	19.94	20.01	22.62	26.10	30.71
Kedelai	Juta Ton	0.42	0.27	0.27	0.61	0.71	0.80	0.88
Anson kacang	Juta Ton	0.62	0.39	0.39	0.63	0.68	0.74	0.82
Kacang tanah	Juta Ton	0.42	0.41	0.41	0.43	0.47	0.51	0.57
Kacang hijau	Juta Ton	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.23	0.24
Andon umbi	Juta Ton	17.87	18.13	18.13	19.40	20.76	22.21	23.87
Ubi Kayu	Juta Ton	16.35	16.59	16.59	17.75	18.96	20.02	21.84
Ubi Jalar	Juta Ton	1.82	1.54	1.54	1.65	1.76	1.89	2.03

Catatan: Target tersebut merupakan target tentative yang disesuaikan dengan kondisi baik teknis maupun non teknis.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam menjalankan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan selain berasal dari APBN, juga dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus, APBD provinsi/kabupaten,

keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, investasi dalam negeri dan investasi asing, perbankan (skim kredit dan Kredit komersial), pinjaman/hibah luar negeri, serta dari swadaya masyarakat. Dukungan dana dari berbagai sumber tersebut, diperlukan guna memperluas cakupan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Sumber pendanaan yang tersedia dari APBN tidak hanya mengandalkan dari dana yang disediakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian saja, tetapi harus menggali dan disinkronkan dengan sumber pendanaan APBN dari Kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Lembaga terkait lainnya. Pemanfaatan anggaran yang berasal dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota juga tidak hanya mengandalkan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan) saja, tetapi harus menggali dan disinergikan dengan sumber pembiayaan dari instansi dan lembaga terkait lain yang ada di daerah.

Sumber pendanaan lain yang perlu digali dan disinergikan dalam mendukung program pembangunan adalah dana yang berasal dari swasta dan lembaga keuangan/perkreditan termasuk swadaya petani. Sumber pendanaan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus mampu menggali dan memanfaatkan sumber dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan pembangunan seoptimal mungkin. Sumber pendanaan yang tersedia pada lembaga

keuangan/perkreditan seperti KKP, KUK, KIK, kredit koperasi, *micro finance*, dan skim kredit lainnya dapat memfasilitasi agar para petani/keompok tani dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan sumber pendanaan tersebut. Disamping itu, sumber pendanaan pembangunan lainnya yang cukup potensial adalah yang berasal dari swasta dalam bentuk kerjasama kemitraan atau sistem avalis.

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan tahun 2020-2024 akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran strategis program yaitu (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dalam negeri, (2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan, (3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan, (4) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan, (5) Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, (6) Terkelolanya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang akuntabel dan berkualitas. Dengan langkah sasaran strategi tersebut diharapkan pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dapat meningkat sehingga kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dan terjangkau, meningkatkan penumbuhan dan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani sesuai dengan potensi wilayah serta meningkatkan pendapatan petani. Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ini tentu saja sangat tergantung pada kerjasama semua pelaku pembangunan pertanian, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini merupakan acuan semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan untuk terwujudnya ketahanan pangan nasional, meningkatnya kesejahteraan petani dan juga masyarakat.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Matrik Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading dan Pendanaan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Program/ Regulan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline 2020	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	KEMENTERIAN PERTANIAN														
	S51. Meningkatkan Ketahanan, Akses dan Kemandirian Pangan Berkelanjutan														
	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Strategis dalam Negeri	%	N/A	Pusat	1.61	3.64	4.44	5.34							Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP)
	2. Peningkatan Akses Pangan	%	N/A		3.63	5.17	5.34	5.97							
	3. Peningkatan Akses Pangan Berkelanjutan	%	N/A		2.27	2.27	2.27	2.27							
	4. Peningkatan akses pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	N/A	Pusat	85.10	85.25	85.35	85.50						Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan	
	5. Peningkatan Sumber Organisasi-Program yang Tumbuh dan Dampak Perubahan iklim yang tangguh	%	N/A	Pusat	70.10	70.20	70.30	70.40							
	6. Peningkatan Wilayah yang Terlewat dari Impak Hama Melarat Strategis	%	N/A	Pusat	80.50	80.50	81	81							Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan
	7. Peningkatan Indeks Ketangguhan pangan (IKTP) Ketahanan Masyarakat Nagari yang lebih memenuhi persyaratan (kualitas di tempat produksi) pengaliran ke pasar distritasi	%	N/A	Pusat	100	100	100	100							
	8. Peningkatan Akses Pemasokan Perikanan yang Dikeluarkan	%		Pusat	42	43	44	45							Badan Karantina Pertanian (Barentan)
	9. Peningkatan Akses Pemasokan Perikanan	%	50.43		56.16	56.77	57.41	58.07							
	10. Tingkat kemampuan Sarana Produsi Pertanian	%	N/A	Pusat	86.69	88.14	89.39	90.56							Ditjen Perikanan dan Sumber Perikanan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan
	S52. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian														
	11. Tingkat kemampuan Sarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	N/A		84.40	85.33	86.00	86.80							Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan
	12. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	1.29	Pusat	7.71	9.21	10.75	12.28							
	S53. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian														
	13. Peningkatan Nilai penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	65	Pusat	70	70	75	75							Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSPDMP)
	14. Peningkatan petani yang menerapkan teknologi	%	N/A	Pusat	75	80	85	90							
S54. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Pertanian Nasional															
15. Peningkatan SDM pertanian yang memiliki kapabilitas	%	N/A	Pusat	75	80	85	90							Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSPDMP)	
16. Peningkatan kemampuan petani yang meningkatkan kapabilitasnya	%	N/A	Pusat	19	20	21	22								Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSPDMP)
S55. Terpenuhinya Bimbingan Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel															
17. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79.05	Pusat	80.71	81.46	82.21	82.96							Sekretariat Eselon I Lembaga Kementerian Pertanian Sekretariat Eselon I Lembaga Kementerian Pertanian	
18. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	88.11	Pusat	91.63	91.98	92.36	92.73								

Tipe	Kategori	Sub-kategori	Tipe					Sub-kategori					Keterangan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kategori 1: Tanaman Pangan	Sub-kategori 1: Tanaman Pangan	Sub-kategori 1.1: Tanaman Pangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Keterangan
Kategori 2: Tanaman Pangan	Sub-kategori 2: Tanaman Pangan	Sub-kategori 2.1: Tanaman Pangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Keterangan
Kategori 3: Tanaman Pangan	Sub-kategori 3: Tanaman Pangan	Sub-kategori 3.1: Tanaman Pangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Keterangan

Lampiran 3. Matrik Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), *Cascading* dan Pendanaan Ditjen Tanaman Pangan Level 2 Tahun 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2020	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 1. KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS											Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
KEGIATAN : Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan							902,233	947,345	994,712	1,044,448	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya Produksi Kedelai											Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
IKSK 1 : Jumlah Produksi Kedelai	Juta Ton	0.27	0.61	0.71	0.80	0.88					Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
SASARAN KEGIATAN 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Lokal Non Bens											Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
IKSK 2 : Jumlah Produksi Aneka Umbi	Juta Ton	18.13	19.40	20.76	22.21	23.87					Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
IKSK 3 : Jumlah Produksi aneka Kacang	Juta Ton	0.59	0.63	0.68	0.74	0.82					Direktorat Aneka Kacang Dan Umbi
KEGIATAN : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal							1,009,048	1,059,500	1,112,475	1,168,099	Direktorat Sereal
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya Produksi Padi											Direktorat Sereal
IKSK 1 : Jumlah Produksi Padi	Juta Ton	54.65	55.80	57.50	60.50	65.40					Direktorat Sereal
IKSK 2 : Produksi Beras Bersertifikasi	Juta Ton	0.03	0.14	0.29	0.44	0.60					Direktorat Sereal
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya Produksi Jagung											
IKSK 3 : Jumlah Produksi Jagung	Juta Ton	22.92	23.00	26.00	30.00	35.30					Direktorat Sereal

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2020	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 1. KETERSEDIAAN, ANSES DAN KONSULSI PANGAN BERKUALITAS											Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
KEGIATAN : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan							2,156,974	2,264,823	2,378,064	2,496,967	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan BPPMPSTPH
SASARAN KEGIATAN 1 : Terpenuhiya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi pangan strategis tanaman pangan											Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
RSK 1 : Rasio benih padi bersertifikat yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	60	65	70	75	80					Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
RSK 2 : Rasio benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	80	81	82	83	84					Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
RSK 3 : Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	37	38	39	40	41					Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
SASARAN KEGIATAN 2 : Terpenuhiya kebutuhan perbenihan tanaman pangan lokal non beras											Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
RSK 4 : Rasio benih ubi jalar yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	6	6	6	6	6					Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
RSK 5 : Rasio benih ubi kayu yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	6	11	11	11	11					Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
RSK 6 : Rasio benih kacang tanah yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	11	11	11	11	11					Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
RSK 7 : Rasio benih kacang hijau yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	11	11	11	11	11					Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

PROGRAM/KEGIATAN /SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2020	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM 1. KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS												Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatkan pemanfaatan metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura												BPPMBTPH
Rekomendasi	5	5	5	5	5	5						BPPMBTPH
SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatkan pengujian mutu benih yang dilaksanakan												BPPMBTPH
LHU	1000	1000	1050	1050	1050	1.100						BPPMBTPH
KEGIATAN: Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan							269,268	282,732	296,868	311,712		Direktorat Perlindungan dan BBPOPT
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatkan penanganan OPT dan DPI terhadap luas serangan OPT dan terkena DPI												Direktorat Perlindungan
RSK1 1 : Rasio serangan OPT yang dapat diunggui terhadap luas serangan OPT	%	75	75.2	75.4	75.6	75.8						Direktorat Perlindungan
RSK2 2 : Rasio luas terkena DPI yang dapat diunggui terhadap luas terkena DPI	%	60	60.2	60.4	60.6	60.8						Direktorat Perlindungan
RSK3 3 : Jumlah sertifikat hasil uji mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan	Jumlah	1500	1750	2500	2525	2550						BPMP
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya implementasi rekomendasi penanganan serangan OPT yang diberikan oleh BBPOPT												BBPOPT
RSK4 4 : Rasio luas serangan OPT tanaman padi yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diamankan	%	72.5	72.0	71.5	71.0	70.5						BBPOPT
RSK5 5 : Rasio luas serangan OPT tanaman jagung yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diamankan	%	70.0	69.5	69.0	68.5	68.0						BBPOPT
RSK6 6 : Rasio luas serangan OPT tanaman kedelai yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diamankan	%	21.0	44.0	43.0	42.0	41.0						BBPOPT

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDUKTOR	SATUAN	Baseline 2020	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri												Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
KEGIATAN: Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		0						600,287	630,301	661,816	694,907	Direktorat PPHTP
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatkan pemenuhan Aliran pasca panen tanaman pangan		0										Direktorat PPHTP
IKSK 1 : Rasio pengujian Alat Mesin Pertanian (Alintan) pasca panen Tanaman Pangan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan yang masuk	%	51	52	53	54	55						Direktorat PPHTP
SASARAN KEGIATAN 2. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor												Direktorat PPHTP
IKSK 2 : Rasio Peningkatan kualitas komoditas tanaman pangan untuk mendukung ekspor	%	10	11	12	13	14						Direktorat PPHTP
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN												Eselon II dan UPJ Unggung Dijen Tanaman Pangan
KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Telenis Lainnya pada Dijen Tanaman Pangan								239,072	251,025	263,577	276,756	Sekretariat Direktorat Jenderal
SASARAN KEGIATAN 1 : Terwujudnya Birokrasi Dijen Tanaman Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima												Sekretariat Direktorat Jenderal
IKSK 1 : Nilai PMPRB Dijen Tanaman Pangan	Nilai	29,93	30,83	31,75	32,71	33,69						Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
IKSK 2. Level maturitas penyederhanaan SRP Dijen Tanaman Pangan	Level	0	3	3	3	4						Sekretariat Direktorat Jenderal

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2020	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN												Eselon II dan UPT lingkup Dijen Tanaman Pangan
IKSK 3 : Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian terkait Dijen Tanaman Pangan yang ditindaklanjuti Dijen Tanaman Pangan	%	0	75	80	85	85						Sekretariat Direktorat Jenderal
IKSK 4 : Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Dijen Tanaman Pangan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%	0	80	85	90	90						Sekretariat Direktorat Jenderal
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Dijen Tanaman Pangan												Sekretariat Direktorat Jenderal
IKSK 5 : Tingkat kepuasan unit kerja terkait lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Sekditjen Tanaman Pangan Skala Likert		3,19	3,20	3,23	3,25	3,28						Sekretariat Direktorat Jenderal
IKSK 6 : Tingkat kepuasan pegawai Dijen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Aneka Kacang dan Umbi	Skala Likert	3,19	3,20	3,23	3,25	3,28						Dit. Aneka Kacang dan Umbi
IKSK 7 : Tingkat kepuasan pegawai Dijen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Serelia	Skala Likert	3,19	3,20	3,23	3,25	3,28						Direktorat Serelia
IKSK 8 : Tingkat kepuasan pegawai Dijen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perbenihan	Skala Likert	3,19	3,20	3,23	3,25	3,28						Direktorat Perbenihan

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2020	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 3. DIKUNGAN MANAJEMEN											Eselon II dan UPT lingkup Dijen Tanaman Pangan
IRSK 9: Tingkat kepuasan pegawai Dijen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, pengawasan, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga BBPMBPTH	Skala Ikerti	3.19	3.20	3.23	3.25	3.28					BBPMBPTH
IRSK 10: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMBPTH	Indeks	3.3	3.35	3.40	3.45	3.50					BBPMBPTH
IRSK 11: Tingkat kepuasan pegawai Dijen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan	Skala Ikerti	3.19	3.20	3.23	3.25	3.28					Direktorat Perlindungan
IRSK 12: Tingkat kepuasan pegawai Dijen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, pengawasan, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga BBPOPT	Skala Ikerti	3.19	3.20	3.23	3.25	3.28					BBPOPT
IRSK 13: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPOPT	Indeks	3.5	3.42	3.45	3.48	3.50					BBPOPT
IRSK 14: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPPT	Indeks	3.36	3.38	3.38	3.4	3.4					Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
IRSK 15: Tingkat kepuasan pegawai Dijen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat PHTP	Skala Ikerti	3.19	3.20	3.23	3.25	3.28					Direktorat PHTP
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang Akuntabel dan Bertalitas											
IRSK 16: Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK	Nilai	74	75	77	78	80					Secretariat Direktorat Jenderal

Lampiran 4. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2020 (KSA)

No	Provinsi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
	INDONESIA	10,657,275	51.28	54,649,202
1	ACEH	317,869	55.28	1,757,313
2	SUMATERA UTARA	388,591	52.51	2,040,500
3	SUMATERA BARAT	295,664	46.92	1,387,269
4	RIAU	64,733	37.64	243,685
5	JAMBI	94,772	45.58	386,413
6	SUMATERA SELATAN	551,320	49.75	2,743,059
7	BENGKULU	64,137	45.66	292,834
8	LAMPUNG	545,149	48.62	2,650,289
9	KEP. BANGKA BELITUNG	17,840	32.13	57,324
10	KEP. RIAU	298	28.56	852
11	DKI JAKARTA	914	49.69	4,543
12	JAWA BARAT	1,586,888	56.82	9,016,772
13	JAWA TENGAH	1,666,931	56.93	9,489,164
14	DI YOGYAKARTA	110,548	47.35	523,395
15	JAWA TIMUR	1,754,380	56.68	9,944,538
16	BANTEN	325,333	50.88	1,655,170
17	BAH	90,980	58.49	532,168
18	NUSA TENGGARA BARAT	273,460	48.17	1,317,189
19	NUSA TENGGARA TIMUR	181,690	39.90	725,024
20	KALIMANTAN BARAT	256,575	30.33	778,170
21	KALIMANTAN TENGAH	143,275	31.96	457,952
22	KALIMANTAN SELATAN	289,836	39.69	1,150,306
23	KALIMANTAN TIMUR	73,568	35.67	262,434
24	KALIMANTAN UTARA	9,883	33.97	33,574
25	SULAWESI UTARA	61,827	40.25	248,879
26	SULAWESI TENGAH	178,066	44.49	792,248
27	SULAWESI SELATAN	976,258	48.23	4,708,464
28	SULAWESI TENGGARA	133,697	39.85	532,773
29	GORONTALO	48,686	46.75	227,627
30	SULAWESI BARAT	64,826	53.23	345,050
31	MALUKU	28,668	38.53	110,447
32	MALUKU UTARA	10,301	42.11	43,382
33	PAPUA BARAT	7,570	32.20	24,378
34	PAPUA	52,727	31.48	166,002

Lampiran 5. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2021

No	Nama Provinsi	Luas Tanam (Ha)	L. Panen (Ha)	Provitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
INDONESIA		11,222,283	10,834,088	51.50	55,800,000
1	ACEH	334,725	323,143	53.53	1,794,318
2	SUMATERA UTARA	409,196	395,038	52.74	2,083,469
3	SUMATERA BARAT	311,342	300,570	47.13	1,416,482
4	RIAU	68,166	65,807	37.81	248,817
5	JAMBI	89,268	86,179	45.78	394,551
6	SUMATERA SELATAN	580,555	560,468	19.97	2,800,823
7	BENGKULU	67,538	65,201	45.86	299,001
8	LAMPUNG	574,056	554,194	48.83	2,706,099
9	KEPULAUAN BANGKA BELITI	18,787	18,137	32.27	58,531
10	KEPULAUAN RIAU	314	303	28.68	870
11	DKI JAKARTA	963	930	49.91	4,640
12	JAWA BARAT	1,671,034	1,615,217	37.97	9,206,647
13	JAWA TENGAH	1,733,321	1,694,387	37.18	9,688,987
14	DI YOGYAKARTA	116,410	112,382	47.55	534,418
15	JAWA TIMUR	1,847,407	1,783,487	56.93	10,153,949
16	BANTEN	342,594	330,731	51.10	1,690,025
17	TAJIK	95,805	92,496	58.75	543,375
18	NUSA TENGGARA BARAT	287,961	277,998	48.38	1,344,927
19	NUSA TENGGARA TIMUR	191,325	184,705	40.08	740,292
20	KALIMANTAN BARAT	270,180	260,832	30.46	794,557
21	KALIMANTAN TENGAH	150,872	145,652	32.10	467,396
22	KALIMANTAN SELATAN	305,205	294,645	39.86	1,174,530
23	KALIMANTAN TIMUR	77,469	74,789	35.83	267,961
24	KALIMANTAN UTARA	10,407	10,047	34.13	34,281
25	SULAWESI UTARA	65,136	62,854	40.43	254,120
26	SULAWESI TENGAH	187,509	181,021	44.69	808,932
27	SULAWESI SELATAN	1,028,025	992,435	48.44	4,807,615
28	SULAWESI TENGGARA	140,787	135,915	40.02	543,993
29	GORONTALO	51,268	49,494	46.96	232,421
30	SULAWESI BARAT	68,264	65,902	53.46	352,316
31	MALUKU	30,188	29,144	38.70	112,773
32	MALUKU UTARA	10,818	10,473	42.30	44,296
33	PAPUA BARAT	7,972	7,696	32.34	24,892
34	PAPUA	55,523	53,602	31.62	169,498

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 6. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2022

No	Nama Provinsi	Luas Tanam (Ha)	L Panen (Ha)	Previtas	Produksi (Ton)
	INDONESIA	11,363,791	10,970,603	52.41	57,509,000
1	ACEH	338,942	327,215	56.51	1,848,984
2	SUMATERA UTARA	414,353	400,016	53.67	2,146,944
3	SUMATERA BARAT	315,263	304,357	47.96	1,459,637
4	RIAU	69,023	66,636	38.48	256,397
5	JAMBI	90,393	87,265	46.59	406,571
6	SUMATERA SELATAN	587,870	567,530	50.85	2,886,152
7	HENGKULU	68,389	66,023	46.67	308,110
8	LAMPUNG	581,289	561,177	49.69	2,788,543
9	KEPULAUAN BANGKA BELIT	19,033	18,365	33.81	60,315
10	KEPULAUAN RIAU	318	307	29.19	897
11	DKI JAKARTA	973	941	50.79	4,781
12	JAWA BARAT	1,692,090	1,633,544	58.08	9,487,136
13	JAWA TENGAH	1,777,439	1,713,940	58.18	9,984,171
14	DI YOKYAKARTA	117,877	113,798	48.39	550,699
15	JAWA TIMUR	1,870,686	1,805,960	57.94	10,463,290
16	BANTEN	346,901	334,898	52.00	1,741,513
17	HALI	97,012	93,656	59.79	559,929
18	NUSA TENGGARA BARAT	291,590	281,501	49.23	1,385,802
19	NUSA TENGGARA TIMUR	193,736	187,032	40.79	762,845
20	KALIMANTAN BARAT	273,585	264,119	31.00	818,764
21	KALIMANTAN TENGAH	152,773	147,487	32.67	481,841
22	KALIMANTAN SELATAN	309,051	298,358	40.37	1,210,313
23	KALIMANTAN TIMUR	78,446	75,731	36.46	276,125
24	KALIMANTAN UTARA	10,538	10,174	34.72	35,326
25	SULAWESI UTARA	65,927	63,646	41.14	261,862
26	SULAWESI TENGAH	189,872	183,302	15.48	833,577
27	SULAWESI SELATAN	1,040,978	1,004,961	49.30	4,954,084
28	SULAWESI TENGGARA	142,560	137,628	40.73	560,566
29	GORONTALO	51,914	50,118	47.79	239,301
30	SULAWESI BARAT	69,124	66,732	54.40	363,050
31	MALUKU	30,569	29,511	39.38	116,209
32	MALUKU UTARA	10,983	10,603	43.04	45,646
33	PAPUA BARAT	8,073	7,793	32.91	25,650
34	PAPUA	56,223	54,278	32.18	174,662

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 7. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2023

No	Nama Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
	INDONESIA	11,725,041	11,319,353	53.45	60,500,000
1	ACEH	349,717	337,617	57.62	1,915,153
2	SUMATERA UTARA	427,525	412,732	54.73	2,258,958
3	SUMATERA BARAT	325,287	314,033	48.91	1,535,792
4	RIAU	71,219	68,755	39.21	269,771
5	JAMBI	93,266	90,036	47.51	427,783
6	SUMATERA SELATAN	606,558	585,571	51.86	3,036,734
7	BENGKULU	70,563	68,123	17.39	321,185
8	LAMPUNG	569,768	579,016	50.67	2,934,032
9	KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG	19,628	18,948	33.49	63,462
10	KEPULAUAN RIAU	328	317	29.77	944
11	DKI JAKARTA	1,006	971	51.79	5,030
12	JAWA BARAT	1,745,881	1,685,474	59.22	9,982,117
13	JAWA TENGAH	1,833,944	1,770,489	59.33	10,505,084
14	DI YOGYAKARTA	121,824	117,416	19.35	579,131
15	JAWA TIMUR	1,930,154	1,863,371	59.08	11,009,210
16	BANTEN	337,929	345,544	53.03	1,832,374
17	BALI	100,096	96,633	50.97	589,143
18	NUSA TENGGARA BARAT	300,859	290,446	50.21	1,458,309
19	NUSA TENGGARA TIMUR	199,894	192,978	41.39	802,546
20	KALIMANTAN BARAT	282,282	272,515	31.61	861,182
21	KALIMANTAN TENGAH	157,630	152,176	33.32	506,981
22	KALIMANTAN SELATAN	318,873	307,842	41.37	1,273,460
23	KALIMANTAN TIMUR	80,939	78,139	37.18	290,531
24	KALIMANTAN UTARA	10,873	10,497	35.41	37,169
25	SULAWESI UTARA	68,022	65,669	41.96	275,525
26	SULAWESI TENGAH	195,908	189,129	46.37	877,068
27	SULAWESI SELATAN	1,074,071	1,036,908	50.27	5,212,558
28	SULAWESI TENGGARA	147,092	142,003	41.34	589,813
29	GORONTALO	53,564	51,711	48.73	251,997
30	SULAWESI BARAT	71,321	68,853	55.48	381,092
31	MALUKU	31,541	30,449	40.16	122,372
32	MALUKU UTARA	11,334	10,942	43.89	48,027
33	PAPUA BARAT	8,329	8,041	33.36	26,988
34	PAPUA	58,010	56,003	32.82	183,775

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 8. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2024

No	Nama Provinsi	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
	INDONESIA	12,430,081	12,000,000	54.50	65,400,000
1	ACEH	370,746	357,918	58.76	2,103,918
2	SUMATERA UTARA	433,232	437,530	53.81	2,441,913
3	SUMATERA BARAT	344,847	332,916	49.87	1,660,178
4	RIAU	75,501	72,689	40.01	291,824
5	JAMBI	98,875	95,454	48.45	462,430
6	SUMATERA SELATAN	643,031	620,782	52.88	3,282,585
7	BENGKULU	74,806	72,218	48.53	350,441
8	LAMPUNG	655,833	613,833	51.67	3,171,565
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20,808	20,088	34.15	68,801
10	KEPULAUAN RIAU	318	336	30.35	1,020
11	DKI JAKARTA	1,067	1,030	52.81	5,438
12	JAWA BARAT	1,850,863	1,786,823	50.39	10,790,586
13	JAWA TENGAH	1,944,221	1,876,931	50.50	11,355,909
14	DI YOGYAKARTA	128,937	124,476	50.32	626,360
15	JAWA TIMUR	2,016,216	1,975,417	50.24	11,900,865
16	BANTEN	379,451	366,322	54.07	1,980,781
17	BALE	106,113	102,443	62.17	636,859
18	NUSA TENGGARA BARAT	318,950	307,815	51.19	1,576,312
19	NUSA TENGGARA TIMUR	211,814	204,382	42.41	867,554
20	KALIMANTAN BARAT	299,256	288,902	32.23	931,256
21	KALIMANTAN TENGAH	167,108	161,326	33.97	548,042
22	KALIMANTAN SELATAN	338,050	326,353	42.48	1,376,599
23	KALIMANTAN TIMUR	85,806	82,837	37.91	314,062
24	KALIMANTAN UTARA	11,527	11,128	36.11	40,179
25	SULAWESI UTARA	72,113	69,618	42.78	297,840
26	SULAWESI TENGAH	207,688	200,302	47.29	948,103
27	SULAWESI SELATAN	1,138,656	1,099,258	51.26	5,634,732
28	SULAWESI TENGGARA	155,937	150,542	42.35	637,580
29	GORONTALO	56,785	54,820	49.69	272,407
30	SULAWESI BARAT	75,610	72,994	56.57	412,930
31	MALUKU	33,437	32,280	40.95	132,173
32	MALUKU UTARA	12,016	11,600	44.76	51,917
33	PAPUA BARAT	8,830	8,524	34.22	29,171
34	PAPUA	61,499	59,371	30.46	198,659

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 9. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2021

No.	Provinsi	Target Jagung Tahun 2020			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
	Indonesia	4,256,266	4,109,000	55.78	22,920,000
1	Aceh	44,704	42,674	56.85	242,504
2	Sumatera Utara	221,288	213,632	59.78	1,277,090
3	Sumatera Barat	87,070	84,058	55.77	548,683
4	Riau	10,289	9,933	45.75	45,441
5	Jambi	7,184	7,708	60.44	46,585
6	Sumatera Selatan	106,303	102,625	57.17	689,304
7	Bengkulu	21,500	20,756	56.80	117,885
8	Lampung	342,655	330,799	58.64	2,270,763
9	Kep. Babel	727	701	32.98	2,313
10	Kep. Riau	35	34	41.30	140
11	DKI Jakarta	-	-	0.00	-
12	Jawa Barat	136,467	131,745	75.15	990,067
13	Jawa Tengah	440,561	425,318	61.75	2,620,339
14	DI Yogyakarta	49,277	47,572	53.63	255,107
15	Jawa Timur	929,142	896,994	54.12	4,864,439
16	Banten	17,526	16,920	51.87	87,758
17	Bali	13,681	13,208	45.32	59,852
18	NTB	266,647	257,421	57.75	1,743,997
19	NTT	274,465	264,968	26.51	702,539
20	Kalimantan Barat	32,269	31,152	50.96	158,752
21	Kalimantan Tengah	10,256	9,901	52.25	51,732
22	Kalimantan Selatan	94,526	91,256	60.46	551,737
23	Kalimantan Timur	12,730	12,289	69.00	84,792
24	Kalimantan Utara	732	707	35.05	2,478
25	Sulawesi Utara	216,873	209,369	47.65	997,644
26	Sulawesi Tengah	93,651	90,411	45.67	412,905
27	Sulawesi Selatan	323,588	312,392	55.99	1,749,085
28	Sulawesi Tenggara	41,793	39,864	42.19	168,177
29	Gorontalo	298,341	288,019	50.37	1,450,749
30	Sulawesi Barat	120,342	116,178	51.31	596,160
31	Maluku	11,613	11,211	33.49	37,549
32	Maluku Utara	26,249	25,341	31.38	79,526
33	Papua Barat	1,039	1,003	43.36	4,351
34	Papua	2,943	2,841	47.40	13,467

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 10. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2021

No.	Provinsi	Target Jagung Tahun 2021			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
	Indonesia	4,267,661	4,120,000	55.83	23,000,000
1	Aceh	44,322	42,788	56.89	243,441
2	Sumatera Utara	221,681	214,204	59.83	1,281,548
3	Sumatera Barat	87,303	84,283	65.33	550,598
4	Riau	10,316	9,959	45.79	45,600
5	Jambi	8,006	7,729	60.49	46,747
6	Sumatera Selatan	105,588	102,900	67.22	691,710
7	Bengkulu	21,557	20,811	56.84	118,296
8	Lampung	343,572	331,685	68.70	2,278,689
9	Kep.Babel	729	703	33.00	2,321
10	Kep.Riau	35	34	41.33	141
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	136,833	132,058	75.21	993,523
13	Jawa Tengah	441,741	426,457	61.80	2,635,506
14	DI Yogyakarta	49,409	47,700	53.67	255,998
15	Jawa Timur	531,629	509,385	54.16	4,871,383
16	Banten	17,573	16,965	51.93	88,064
17	Bali	13,718	13,243	45.35	60,061
18	NTB	267,360	258,110	67.80	1,750,085
19	NTT	275,199	265,678	26.54	704,992
20	Kalimantan Barat	32,355	31,236	51.00	159,307
21	Kalimantan Tengah	10,783	9,927	53.29	51,912
22	Kalimantan Selatan	94,780	91,500	60.51	553,662
23	Kalimantan Timur	12,764	12,322	69.05	85,088
24	Kalimantan Utara	734	709	35.08	2,486
25	Sulawesi Utara	217,454	209,930	47.69	1,031,126
26	Sulawesi Tengah	93,502	90,653	45.71	414,346
27	Sulawesi Selatan	324,455	313,229	56.04	1,755,190
28	Sulawesi Tenggara	41,403	39,971	42.22	168,764
29	Gorontalo	299,140	288,790	50.41	1,455,813
30	Sulawesi Barat	170,664	166,489	51.36	858,741
31	Maluku	11,644	11,241	33.52	37,680
32	Maluku Utara	25,319	25,409	31.41	79,804
33	Papua Barat	1,042	1,006	43.40	4,366
34	Papua	2,851	2,849	47.44	13,514

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 11. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2022

No.	Provinsi	Target Jagung Tahun 2022			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
	Indonesia	4,723,130	4,560,000	57.02	26,000,000
1	Aceh	49,055	47,358	58.11	275,194
2	Sumatera Utara	245,577	237,080	61.11	1,448,706
3	Sumatera Barat	96,627	93,284	66.72	622,415
4	Riau	11,418	11,023	46.76	51,547
5	Jambi	8,861	8,554	61.78	52,845
6	Sumatera Selatan	117,971	113,889	68.66	781,933
7	Bengkulu	23,859	23,034	58.06	133,726
8	Lampung	380,265	367,107	70.17	2,575,908
9	Kep.Babel	806	778	33.71	2,624
10	Kep.Riau	39	38	42.21	158
11	DKI Jakarta	-	-	#DIV/0!	-
12	Jawa Barat	151,446	146,206	76.82	1,123,113
13	Jawa Tengah	488,917	472,001	63.12	2,979,267
14	DI Yogyakarta	54,686	52,794	54.81	289,389
15	Jawa Timur	1,031,124	995,447	55.32	5,506,781
16	Banten	19,450	18,777	53.02	99,550
17	Bali	15,183	14,657	46.32	67,895
18	NTB	285,913	285,675	69.25	1,978,357
19	NTT	304,590	294,051	27.10	796,947
20	Kalimantan Barat	35,811	34,572	52.09	180,086
21	Kalimantan Tengah	11,381	10,987	53.41	58,683
22	Kalimantan Selatan	104,902	101,272	61.80	625,879
23	Kalimantan Timur	14,127	13,638	70.53	96,187
24	Kalimantan Utara	813	784	35.83	2,811
25	Sulawesi Utara	240,677	232,349	48.71	1,131,708
26	Sulawesi Tengah	103,930	100,334	48.68	468,392
27	Sulawesi Selatan	359,105	346,680	57.23	1,984,127
28	Sulawesi Tenggara	45,825	44,239	43.12	190,777
29	Gorontalo	331,087	319,631	51.45	1,645,702
30	Sulawesi Barat	133,551	128,930	52.45	676,272
31	Maluku	12,887	12,442	34.24	42,595
32	Maluku Utara	29,130	28,122	32.08	90,213
33	Papua Barat	1,153	1,114	44.33	4,936
34	Papua	3,266	3,153	48.45	15,276

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 12. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2023

No.	Provinsi	Target Jagung Tahun 2023			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
	Indonesia	5,262,067	5,080,000	59.06	30,000,000
1	Aceh	54,649	52,759	60.29	317,531
2	Sumatera Utara	273,581	264,115	63.29	1,671,584
3	Sumatera Barat	137,646	103,921	69.11	718,171
4	Riau	12,720	12,780	48.44	51,478
5	Jambi	9,871	9,530	63.98	60,975
6	Sumatera Selatan	131,424	126,877	71.11	902,231
7	Bengkulu	26,580	25,661	60.13	154,299
8	Lampung	423,628	408,971	72.68	2,972,202
9	Kep. Babel	898	867	34.91	3,028
10	Kep. Riau	44	42	43.72	184
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	168,716	162,878	79.56	1,295,900
13	Jawa Tengah	544,671	525,825	65.38	3,437,616
14	DI Yogyakarta	60,922	58,814	56.77	333,910
15	Jawa Timur	1,148,708	1,108,963	57.30	6,353,978
16	Banten	21,688	20,918	54.91	114,866
17	Bali	16,914	16,329	47.98	78,340
18	NTB	329,658	318,252	71.73	2,282,719
19	NTT	339,324	327,583	28.07	919,554
20	Kalimantan Barat	89,894	88,514	53.95	207,791
21	Kalimantan Tengah	12,679	12,240	55.32	67,712
22	Kalimantan Selatan	116,864	112,821	64.01	722,168
23	Kalimantan Timur	15,738	15,193	75.05	110,985
24	Kalimantan Utara	905	874	37.11	3,243
25	Sulawesi Utara	268,122	258,845	50.45	1,305,817
26	Sulawesi Tengah	115,782	111,776	48.35	540,452
27	Sulawesi Selatan	430,056	386,214	59.28	2,289,378
28	Sulawesi Tenggara	51,051	49,284	44.66	220,127
29	Gorontalo	368,842	356,080	53.33	1,899,887
30	Sulawesi Barat	148,780	143,533	54.33	780,214
31	Maluku	14,357	13,860	35.46	49,148
32	Maluku Utara	32,452	31,329	33.23	104,092
33	Papua Barat	1,285	1,241	45.91	5,695
34	Papua	3,638	3,513	50.18	17,627

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 13. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2024

No.	Provinsi	Target Jagung Tahun 2024			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
	Indonesia	6,090,739	5,880,000	60.03	35,300,000
1	Aceh	53,256	61,067	61.18	373,629
2	Sumatera Utara	316,565	305,708	64.34	1,966,897
3	Sumatera Barat	174,598	120,287	70.25	845,048
4	Riau	14,723	14,214	49.24	69,985
5	Jambi	11,426	11,030	65.05	71,747
6	Sumatera Selatan	152,121	146,857	72.29	1,061,625
7	Bengkulu	30,766	29,702	61.23	181,559
8	Lampung	490,341	473,375	73.88	3,497,797
9	Kep. Babel	1,040	1,004	35.49	3,562
10	Kep. Riau	50	49	44.45	216
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	195,285	186,528	80.88	1,524,842
13	Jawa Tengah	630,446	608,632	66.46	4,044,128
14	DI Yogyakarta	70,516	68,076	57.71	392,901
15	Jawa Timur	1,329,607	1,283,602	58.25	7,476,514
16	Banten	25,080	24,212	55.82	135,159
17	Bali	19,578	18,900	48.77	92,180
18	NTB	381,573	368,370	72.92	2,685,999
19	NTT	392,760	379,171	28.54	1,082,009
20	Kalimantan Barat	46,177	44,579	54.85	244,501
21	Kalimantan Tengah	14,674	14,168	56.24	79,674
22	Kalimantan Selatan	135,268	130,588	65.07	849,751
23	Kalimantan Timur	18,216	17,586	74.26	130,592
24	Kalimantan Utara	1,048	1,012	37.72	3,816
25	Sulawesi Utara	310,346	299,608	51.28	1,536,511
26	Sulawesi Tengah	134,015	129,378	49.15	635,932
27	Sulawesi Selatan	463,057	447,035	60.26	2,693,835
28	Sulawesi Tenggara	59,090	57,046	45.41	259,026
29	Gorontalo	426,928	412,156	54.21	2,234,357
30	Sulawesi Barat	172,210	166,252	55.23	918,170
31	Maluku	16,618	16,043	36.05	57,831
32	Maluku Utara	37,562	36,263	33.78	122,481
33	Papua Barat	1,487	1,436	46.67	6,701
34	Papua	4,211	4,066	51.01	20,741

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 14. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2020

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		240,731	228,694	14.45	323,170
1	Aceh	1,882	1,788	14.31	2,526
2	Sumatera Utara	5,200	4,940	11.09	6,981
3	Sumatera Barat	2,125	2,019	7.71	2,853
4	Riau	1,420	1,349	10.94	1,906
5	Jambi	8,420	7,998	13.63	11,303
6	Sumatera Selatan	2,000	1,900	10.87	2,685
7	Bengkulu	122	116	10.96	163
8	Lampung	4,234	4,022	12.44	5,683
9	Kep.Babel	1	1	7.45	2
10	Kep.Riau	1	1	7.45	2
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	42,600	40,470	15.93	57,188
13	Jawa Tengah	48,255	45,842	15.97	64,780
14	DI Yogyakarta	5,750	5,463	11.71	7,719
15	Jawa Timur	65,479	62,205	14.78	87,902
16	Banten	2,371	2,253	12.29	3,183
17	Bali	1,592	1,513	12.23	2,137
18	Nusa Tenggara Barat	18,250	17,337	11.74	24,500
19	Nusa Tenggara Timur	4,221	4,010	9.13	5,666
20	Kalimantan Barat	314	299	13.94	422
21	Kalimantan Tengah	29	27	12.15	39
22	Kalimantan Selatan	1,960	1,862	13.81	2,631
23	Kalimantan Timur	16	14	14.56	21
24	Kalimantan Utara	1	1	9.59	2
25	Sulawesi Utara	7,432	7,060	13.07	9,977
26	Sulawesi Tengah	8,823	8,382	12.15	11,845
27	Sulawesi Selatan	4,511	4,285	15.89	6,056
28	Sulawesi Tenggara	928	881	16.21	1,245
29	Gorontalo	1,145	1,088	15.37	1,537
30	Sulawesi Barat	1,540	1,464	13.78	2,068
31	Maluku	4	4	6.99	5
32	Maluku Utara	36	35	8.03	49
33	Papua Barat	20	19	10.61	27
34	Papua	48	46	12.12	64

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 15. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2021

No.	Provinsi	Luas Tanam	Luas Panen	Provitas	Produksi
	Indonesia	422,500	401,375	15.20	610,000
1	Aceh	1,165	1,107	14.01	1,550
2	Sumatera Utara	5,628	5,347	15.08	8,062
3	Sumatera Barat	86	82	14.10	115
4	Riau	4,309	4,094	15.11	6,185
5	Jambi	12,280	11,666	13.65	15,927
6	Sumatera Selatan	1,672	1,588	14.05	2,231
7	Bengkulu	23	22	13.99	31
8	Lampung	3,699	3,514	14.26	5,010
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	123,742	117,555	17.94	210,871
13	Jawa Tengah	53,781	51,092	17.42	88,989
14	DI Yogyakarta	13,692	13,007	8.94	11,631
15	Jawa Timur	90,484	85,960	13.34	114,662
16	Banten	1,142	1,085	14.53	1,577
17	Bali	2,809	2,669	12.49	3,335
18	NTB	51,707	49,122	13.92	68,367
19	NTT	3,830	3,639	7.57	2,754
20	Kalimantan Barat	150	142	9.70	138
21	Kalimantan Tengah	218	207	14.07	291
22	Kalimantan Selatan	4,526	4,300	11.89	5,113
23	Kalimantan Timur	141	134	14.28	191
24	Kalimantan Utara	2	2	15.71	3
25	Sulawesi Utara	26,585	25,256	14.16	35,773
26	Sulawesi Tengah	6,530	6,204	10.16	6,305
27	Sulawesi Selatan	5,412	5,141	13.22	6,795
28	Sulawesi Tenggara	1,010	960	15.41	1,479
29	Gorontalo	932	885	13.16	1,164
30	Sulawesi Barat	6,458	6,135	17.59	10,791
31	Maluku	5	4	14.57	6
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	46	44	14.20	63
34	Papua	436	414	14.28	591

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 16. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2022

No.	Provinsi	Luas Tanam	Luas Panen	Provitas	Produksi
Indonesia		472,500	448,875	15.80	709,000
1	Aceh	1,303	1,238	14.51	1,796
2	Sumatera Utara	6,294	5,980	15.64	9,352
3	Sumatera Barat	96	92	14.93	137
4	Riau	4,819	4,578	15.86	7,261
5	Jambi	13,733	13,046	14.15	18,457
6	Sumatera Selatan	1,870	1,776	14.87	2,642
7	Bengkulu	26	25	14.82	37
8	Lampung	4,137	3,930	15.05	5,915
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	138,386	131,467	18.55	243,808
13	Jawa Tengah	60,145	57,138	18.31	104,607
14	DI Yogyakarta	15,312	14,547	9.26	13,474
15	Jawa Timur	101,192	96,132	13.93	133,867
16	Banten	1,277	1,213	15.39	1,867
17	Bali	3,142	2,985	13.25	3,954
18	NTB	57,826	54,935	14.50	79,645
19	NTT	4,284	4,069	8.05	3,277
20	Kalimantan Barat	167	159	10.23	163
21	Kalimantan Tengah	243	231	15.02	347
22	Kalimantan Selatan	5,062	4,809	12.60	6,059
23	Kalimantan Timur	157	149	14.98	224
24	Kalimantan Utara	3	2	16.65	4
25	Sulawesi Utara	29,732	28,245	15.01	42,393
26	Sulawesi Tengah	7,303	6,938	9.48	6,576
27	Sulawesi Selatan	6,052	5,750	13.94	8,017
28	Sulawesi Tenggara	1,130	1,073	16.36	1,756
29	Gorontalo	1,042	990	13.94	1,380
30	Sulawesi Barat	7,222	6,861	16.35	11,218
31	Maluku	5	5	15.44	8
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	52	49	14.72	73
34	Papua	487	463	14.83	686

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 17. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2023

No.	Provinsi	Luas Tanam	Luas Panen	Provitas	Produksi
	Indonesia	522,500	496,375	16.04	796,000
1	Aceh	1,441	1,369	14.73	2,017
2	Sumatera Utara	6,961	6,612	15.88	10,500
3	Sumatera Barat	107	101	15.16	153
4	Riau	5,329	5,063	16.10	8,152
5	Jambi	15,186	14,427	14.36	20,722
6	Sumatera Selatan	2,068	1,964	15.10	2,966
7	Bengkulu	29	27	15.05	41
8	Lampung	4,574	4,346	15.28	6,641
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	153,030	145,379	18.83	273,725
13	Jawa Tengah	66,510	63,185	18.59	117,443
14	DI Yogyakarta	16,933	16,086	9.40	15,128
15	Jawa Timur	111,900	106,305	14.14	150,294
16	Banten	1,412	1,342	15.62	2,096
17	Bali	3,474	3,301	13.45	4,440
18	NTB	63,946	60,748	14.72	89,419
19	NTT	4,737	4,500	8.18	3,679
20	Kalimantan Barat	185	176	10.39	183
21	Kalimantan Tengah	269	256	15.24	390
22	Kalimantan Selatan	5,598	5,318	12.79	6,802
23	Kalimantan Timur	174	165	15.20	251
24	Kalimantan Utara	3	3	16.91	5
25	Sulawesi Utara	32,878	31,234	15.24	47,595
26	Sulawesi Tengah	8,076	7,672	9.62	7,383
27	Sulawesi Selatan	6,693	6,358	14.16	9,000
28	Sulawesi Tenggara	1,249	1,187	16.61	1,972
29	Gorontalo	1,152	1,094	14.15	1,549
30	Sulawesi Barat	7,986	7,587	16.60	12,595
31	Maluku	6	5	15.68	9
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	57	55	14.95	82
34	Papua	539	512	15.05	770

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 18. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2024

No.	Provinsi	Luas Tanam	Luas Panen	Provitas	Produksi
	Indonesia	572,500	543,875	16.18	880,000
1	Aceh	1,579	1,500	14.87	2,229
2	Sumatera Utara	7,627	7,245	16.02	11,608
3	Sumatera Barat	117	111	15.29	170
4	Riau	5,839	5,547	16.25	9,012
5	Jambi	16,639	15,807	14.49	22,909
6	Sumatera Selatan	2,265	2,152	15.24	3,279
7	Bengkulu	31	30	15.18	45
8	Lampung	5,012	4,762	15.42	7,342
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	167,674	159,290	19.00	302,611
13	Jawa Tengah	72,875	69,231	18.75	129,837
14	DI Yogyakarta	18,553	17,625	9.49	16,724
15	Jawa Timur	122,608	116,478	14.26	166,154
16	Banten	1,547	1,470	15.76	2,317
17	Bali	3,807	3,617	13.57	4,908
18	NTB	70,065	66,561	14.85	98,855
19	NTT	5,190	4,931	8.25	4,067
20	Kalimantan Barat	203	193	10.48	202
21	Kalimantan Tengah	295	280	15.38	431
22	Kalimantan Selatan	6,133	5,827	12.91	7,520
23	Kalimantan Timur	190	181	15.34	278
24	Kalimantan Utara	3	3	17.06	5
25	Sulawesi Utara	36,024	34,223	15.38	52,618
26	Sulawesi Tengah	8,849	8,406	9.71	8,162
27	Sulawesi Selatan	7,333	6,967	14.28	9,950
28	Sulawesi Tenggara	1,369	1,300	16.76	2,180
29	Gorontalo	1,262	1,199	14.28	1,713
30	Sulawesi Barat	8,750	8,313	16.75	13,924
31	Maluku	6	6	15.82	9
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	63	60	15.08	90
34	Papua	590	561	15.19	852

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 19. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2020

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		663,137	631,559	262.65	16,587,900
1	Aceh	1,101	1,048	165.29	17,330
2	Sumatera Utara	30,765	29,300	364.12	1,066,871
3	Sumatera Barat	4,244	4,041	443.01	179,041
4	Riau	4,417	4,206	327.60	137,803
5	Jambi	1,917	1,825	260.03	47,466
6	Sumatera Selatan	4,640	4,419	380.33	168,064
7	Bengkulu	1,217	1,159	273.22	31,668
8	Lampung	189,167	180,159	282.36	5,087,062
9	Kep.Babel	3,207	3,054	305.88	93,421
10	Kep.Riau	527	502	337.22	16,916
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	42,900	40,857	275.42	1,125,279
13	Jawa Tengah	117,675	112,071	285.64	3,201,203
14	DI Yogyakarta	56,399	53,713	173.37	931,243
15	Jawa Timur	100,736	95,939	276.50	2,652,716
16	Banten	3,419	3,256	225.77	73,518
17	Bali	7,709	7,342	136.44	100,174
18	Nusa Tenggara Barat	2,408	2,293	243.59	55,858
19	Nusa Tenggara Timur	46,399	44,190	149.49	660,603
20	Kalimantan Barat	9,468	9,017	177.11	159,702
21	Kalimantan Tengah	3,046	2,901	308.88	89,597
22	Kalimantan Selatan	2,239	2,132	305.94	65,240
23	Kalimantan Timur	2,086	1,987	276.81	54,993
24	Kalimantan Utara	1,383	1,317	258.69	34,063
25	Sulawesi Utara	2,833	2,698	130.53	35,222
26	Sulawesi Tengah	1,802	1,717	263.46	45,226
27	Sulawesi Selatan	9,316	8,873	222.29	197,224
28	Sulawesi Tenggara	4,800	4,571	247.61	113,188
29	Gorontalo	143	136	167.28	2,282
30	Sulawesi Barat	884	842	252.58	21,262
31	Maluku	3,269	3,113	209.41	65,197
32	Maluku Utara	1,163	1,107	284.89	31,550
33	Papua Barat	1,101	1,048	164.88	17,282
34	Papua	759	723	133.30	9,633

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 20. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2021

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		695,782	662,649	267.85	17,749,055
1	Aceh	1,155	1,100	168.57	18,544
2	Sumatera Utara	32,280	30,743	371.32	1,141,553
3	Sumatera Barat	4,452	4,240	451.78	191,574
4	Riau	4,634	4,413	334.09	147,449
5	Jambi	2,011	1,915	265.17	50,788
6	Sumatera Selatan	4,868	4,636	387.86	179,828
7	Bengkulu	1,277	1,216	278.63	33,885
8	Lampung	198,479	189,028	287.96	5,443,157
9	Kep.Babel	3,365	3,205	311.93	99,961
10	Kep.Riau	553	526	343.90	18,100
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	45,012	42,869	280.87	1,204,049
13	Jawa Tengah	123,468	117,588	291.30	3,425,287
14	DI Yogyakarta	59,175	56,357	176.81	996,430
15	Jawa Timur	105,695	100,661	281.98	2,838,407
16	Banten	3,588	3,417	230.24	78,664
17	Bali	8,089	7,704	139.14	107,187
18	Nusa Tenggara Barat	2,526	2,406	248.41	59,768
19	Nusa Tenggara Timur	48,683	46,365	152.45	706,845
20	Kalimantan Barat	9,934	9,461	180.62	170,881
21	Kalimantan Tengah	3,196	3,043	315.00	95,869
22	Kalimantan Selatan	2,349	2,237	311.99	69,807
23	Kalimantan Timur	2,189	2,084	282.29	58,842
24	Kalimantan Utara	1,451	1,382	263.81	36,448
25	Sulawesi Utara	2,973	2,831	133.11	37,688
26	Sulawesi Tengah	1,891	1,801	268.68	48,392
27	Sulawesi Selatan	9,775	9,309	226.69	211,030
28	Sulawesi Tenggara	5,036	4,796	252.51	121,111
29	Gorontalo	150	143	170.59	2,442
30	Sulawesi Barat	927	883	257.58	22,750
31	Maluku	3,430	3,267	213.56	69,760
32	Maluku Utara	1,220	1,162	290.53	33,759
33	Papua Barat	1,155	1,100	168.15	18,492
34	Papua	796	758	135.94	10,307

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 21. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2022

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		731,917	697,063	272.45	18,991,492
1	Aceh	1,215	1,157	171.46	19,842
2	Sumatera Utara	33,956	32,339	377.70	1,221,461
3	Sumatera Barat	4,684	4,461	459.54	204,984
4	Riau	4,875	4,643	339.83	157,770
5	Jambi	2,115	2,015	269.73	54,343
6	Sumatera Selatan	5,121	4,877	394.52	192,416
7	Bengkulu	1,343	1,279	283.41	36,257
8	Lampung	208,787	198,845	292.90	5,824,179
9	Kep.Babel	3,540	3,371	317.29	106,958
10	Kep.Riau	581	554	349.81	19,367
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	47,350	45,095	285.69	1,288,333
13	Jawa Tengah	129,880	123,695	296.30	3,665,058
14	DI Yogyakarta	62,248	59,284	179.84	1,066,181
15	Jawa Timur	111,184	105,889	286.82	3,037,096
16	Banten	3,774	3,594	234.19	84,171
17	Bali	8,509	8,104	141.53	114,690
18	Nusa Tenggara Barat	2,658	2,531	252.68	63,952
19	Nusa Tenggara Timur	51,212	48,773	155.07	756,325
20	Kalimantan Barat	10,450	9,952	183.72	182,843
21	Kalimantan Tengah	3,362	3,202	320.41	102,580
22	Kalimantan Selatan	2,471	2,354	317.35	74,693
23	Kalimantan Timur	2,302	2,193	287.14	62,961
24	Kalimantan Utara	1,526	1,453	268.34	38,999
25	Sulawesi Utara	3,127	2,978	135.40	40,326
26	Sulawesi Tengah	1,989	1,895	273.29	51,780
27	Sulawesi Selatan	10,282	9,793	230.58	225,802
28	Sulawesi Tenggara	5,298	5,045	256.85	129,589
29	Gorontalo	158	151	173.52	2,613
30	Sulawesi Barat	976	929	262.00	24,343
31	Maluku	3,608	3,436	217.23	74,644
32	Maluku Utara	1,283	1,222	295.52	36,122
33	Papua Barat	1,215	1,157	171.04	19,786
34	Papua	838	798	138.27	11,029

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 22. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2023

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
	Indonesia	752,360	716,534	283.60	20,320,896
1	Aceh	1,249	1,190	178.48	21,231
2	Sumatera Utara	34,905	33,243	393.16	1,306,964
3	Sumatera Barat	4,815	4,585	478.34	219,333
4	Riau	5,011	4,772	353.73	168,814
5	Jambi	2,175	2,071	280.77	58,148
6	Sumatera Selatan	5,264	5,013	410.66	205,885
7	Bengkulu	1,381	1,315	295.01	38,795
8	Lampung	214,619	204,399	304.89	6,231,871
9	Kep.Babel	3,638	3,465	330.27	114,445
10	Kep.Riau	598	569	364.12	20,723
11	DKI Jakarta	-	-		-
12	Jawa Barat	48,672	46,355	297.39	1,378,516
13	Jawa Tengah	133,508	127,150	308.42	3,921,612
14	DI Yogyakarta	63,987	60,940	187.20	1,140,813
15	Jawa Timur	114,289	108,847	298.56	3,249,692
16	Banten	3,879	3,695	243.77	90,063
17	Bali	8,747	8,330	147.32	122,718
18	Nusa Tenggara Barat	2,732	2,602	263.02	68,429
19	Nusa Tenggara Timur	52,642	50,135	161.42	809,267
20	Kalimantan Barat	10,742	10,230	191.24	195,642
21	Kalimantan Tengah	3,456	3,291	333.52	109,761
22	Kalimantan Selatan	2,540	2,419	330.34	79,922
23	Kalimantan Timur	2,367	2,254	298.89	67,368
24	Kalimantan Utara	1,569	1,494	279.32	41,729
25	Sulawesi Utara	3,215	3,061	140.94	43,149
26	Sulawesi Tengah	2,045	1,948	284.48	55,404
27	Sulawesi Selatan	10,570	10,066	240.02	241,608
28	Sulawesi Tenggara	5,446	5,186	267.36	138,660
29	Gorontalo	163	155	180.62	2,796
30	Sulawesi Barat	1,003	955	272.72	26,047
31	Maluku	3,709	3,532	226.12	79,869
32	Maluku Utara	1,319	1,256	307.61	38,651
33	Papua Barat	1,249	1,189	178.04	21,171
34	Papua	861	820	143.93	11,801

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 23. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		776,217	739,254	295.50	21,844,964
1	Aceh	1,289	1,227	185.97	22,823
2	Sumatera Utara	36,012	34,297	409.66	1,404,986
3	Sumatera Barat	4,967	4,731	498.41	235,783
4	Riau	5,170	4,924	368.58	181,475
5	Jambi	2,244	2,137	292.55	62,509
6	Sumatera Selatan	5,431	5,172	427.90	221,327
7	Bengkulu	1,425	1,357	307.39	41,705
8	Lampung	221,424	210,880	317.68	6,699,261
9	Kep.Babel	3,754	3,575	344.13	123,028
10	Kep.Riau	617	587	379.40	22,277
11	DKI Jakarta	-	-		-
12	Jawa Barat	50,216	47,824	309.86	1,481,905
13	Jawa Tengah	137,741	131,182	321.37	4,215,733
14	DI Yogyakarta	66,016	62,873	195.06	1,226,374
15	Jawa Timur	117,913	112,298	311.08	3,493,419
16	Banten	4,002	3,812	254.00	96,817
17	Bali	9,024	8,594	153.50	131,922
18	Nusa Tenggara Barat	2,818	2,684	274.06	73,561
19	Nusa Tenggara Timur	54,311	51,725	168.19	869,962
20	Kalimantan Barat	11,082	10,555	199.26	210,315
21	Kalimantan Tengah	3,565	3,395	347.52	117,993
22	Kalimantan Selatan	2,621	2,496	344.20	85,916
23	Kalimantan Timur	2,442	2,325	311.43	72,421
24	Kalimantan Utara	1,618	1,541	291.04	44,859
25	Sulawesi Utara	3,316	3,159	146.86	46,385
26	Sulawesi Tengah	2,110	2,009	296.41	59,560
27	Sulawesi Selatan	10,905	10,386	250.09	259,729
28	Sulawesi Tenggara	5,618	5,351	278.58	149,059
29	Gorontalo	168	160	188.20	3,005
30	Sulawesi Barat	1,035	985	284.17	28,001
31	Maluku	3,826	3,644	235.60	85,859
32	Maluku Utara	1,361	1,296	320.52	41,550
33	Papua Barat	1,288	1,227	185.51	22,759
34	Papua	888	846	149.97	12,686

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 24. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2020

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		83,456	79,481	193.85	1,540,749
1	Aceh	349	333	176.86	5,882
2	Sumatera Utara	6,101	5,810	167.46	97,296
3	Sumatera Barat	4,728	4,503	292.76	131,835
4	Riau	498	474	142.81	6,772
5	Jambi	1,714	1,632	320.30	52,283
6	Sumatera Selatan	996	949	226.39	21,483
7	Bengkulu	1,415	1,348	165.74	22,334
8	Lampung	1,914	1,823	150.45	27,430
9	Kep.Babel	249	237	97.66	2,318
10	Kep.Riau	172	164	99.52	1,635
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	20,376	19,406	225.30	437,209
13	Jawa Tengah	6,341	6,039	237.31	143,318
14	DI Yogyakarta	221	210	116.34	2,447
15	Jawa Timur	9,816	9,349	250.33	234,027
16	Banten	1,173	1,117	128.00	14,300
17	Bali	1,573	1,498	122.89	18,407
18	Nusa Tenggara Barat	786	749	198.32	14,854
19	Nusa Tenggara Timur	6,496	6,186	56.52	34,966
20	Kalimantan Barat	1,575	1,500	120.05	18,003
21	Kalimantan Tengah	604	575	138.65	7,970
22	Kalimantan Selatan	897	854	208.16	17,782
23	Kalimantan Timur	988	941	131.10	12,334
24	Kalimantan Utara	189	180	78.45	1,414
25	Sulawesi Utara	2,108	2,007	90.44	18,155
26	Sulawesi Tengah	1,262	1,202	163.04	19,604
27	Sulawesi Selatan	4,462	4,249	227.10	96,501
28	Sulawesi Tenggara	1,343	1,279	124.79	15,963
29	Gorontalo	56	53	135.61	718
30	Sulawesi Barat	355	339	140.36	4,752
31	Maluku	1,723	1,641	120.93	19,850
32	Maluku Utara	569	542	167.02	9,053
33	Papua Barat	1,156	1,101	116.70	12,844
34	Papua	1,250	1,190	142.91	17,012

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 25. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2021

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		88,521	84,306	195.55	1,648,601
1	Aceh	370	353	178.41	6,294
2	Sumatera Utara	6,471	6,163	168.93	104,107
3	Sumatera Barat	5,015	4,777	295.33	141,063
4	Riau	528	503	144.07	7,246
5	Jambi	1,818	1,731	323.11	55,942
6	Sumatera Selatan	1,057	1,007	228.37	22,986
7	Bengkulu	1,501	1,429	167.19	23,897
8	Lampung	2,031	1,934	151.77	29,351
9	Kep.Babel	264	252	98.52	2,480
10	Kep.Riau	183	174	100.39	1,749
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	21,613	20,583	227.28	467,813
13	Jawa Tengah	6,726	6,406	239.39	153,351
14	DI Yogyakarta	234	223	117.36	2,619
15	Jawa Timur	10,412	9,916	252.53	250,409
16	Banten	1,244	1,185	129.13	15,301
17	Bali	1,668	1,589	123.97	19,695
18	Nusa Tenggara Barat	834	794	200.06	15,894
19	Nusa Tenggara Timur	6,890	6,562	57.02	37,413
20	Kalimantan Barat	1,670	1,591	121.10	19,263
21	Kalimantan Tengah	640	610	139.87	8,528
22	Kalimantan Selatan	951	906	209.99	19,027
23	Kalimantan Timur	1,048	998	132.25	13,197
24	Kalimantan Utara	201	191	79.14	1,513
25	Sulawesi Utara	2,236	2,129	91.23	19,426
26	Sulawesi Tengah	1,339	1,275	164.47	20,976
27	Sulawesi Selatan	4,733	4,507	229.09	103,256
28	Sulawesi Tenggara	1,425	1,357	125.89	17,080
29	Gorontalo	59	56	136.80	768
30	Sulawesi Barat	377	359	141.59	5,084
31	Maluku	1,828	1,741	121.99	21,239
32	Maluku Utara	604	575	168.49	9,687
33	Papua Barat	1,226	1,167	117.73	13,743
34	Papua	1,326	1,263	144.17	18,203

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 26. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2022

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		93,447	88,997	198.21	1,764,003
1	Aceh	391	372	180.83	6,735
2	Sumatera Utara	6,831	6,506	171.23	111,394
3	Sumatera Barat	5,294	5,042	299.34	150,938
4	Riau	558	531	146.03	7,754
5	Jambi	1,919	1,828	327.50	59,858
6	Sumatera Selatan	1,116	1,063	231.48	24,595
7	Bengkulu	1,584	1,509	169.47	25,570
8	Lampung	2,144	2,041	153.84	31,405
9	Kep.Babel	279	266	99.86	2,654
10	Kep.Riau	193	184	101.76	1,872
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	22,815	21,729	230.37	500,560
13	Jawa Tengah	7,100	6,762	242.65	164,085
14	DI Yogyakarta	247	236	118.95	2,802
15	Jawa Timur	10,991	10,468	255.96	267,938
16	Banten	1,313	1,251	130.88	16,372
17	Bali	1,761	1,677	125.66	21,074
18	Nusa Tenggara Barat	881	839	202.78	17,006
19	Nusa Tenggara Timur	7,273	6,927	57.79	40,032
20	Kalimantan Barat	1,763	1,679	122.75	20,612
21	Kalimantan Tengah	676	644	141.77	9,125
22	Kalimantan Selatan	1,004	956	212.85	20,358
23	Kalimantan Timur	1,106	1,053	134.05	14,121
24	Kalimantan Utara	212	202	80.21	1,618
25	Sulawesi Utara	2,360	2,248	92.47	20,786
26	Sulawesi Tengah	1,414	1,346	166.71	22,444
27	Sulawesi Selatan	4,996	4,758	232.21	110,483
28	Sulawesi Tenggara	1,504	1,432	127.60	18,276
29	Gorontalo	62	59	138.66	822
30	Sulawesi Barat	398	379	143.52	5,440
31	Maluku	1,930	1,838	123.65	22,726
32	Maluku Utara	637	607	170.78	10,365
33	Papua Barat	1,294	1,232	119.33	14,705
34	Papua	1,400	1,333	146.13	19,477

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 27. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2023

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		99,366	94,634	199.45	1,887,483
1	Aceh	416	396	181.96	7,206
2	Sumatera Utara	7,264	6,918	172.30	119,192
3	Sumatera Barat	5,630	5,362	301.22	161,503
4	Riau	593	565	146.94	8,296
5	Jambi	2,041	1,943	329.55	64,048
6	Sumatera Selatan	1,186	1,130	232.93	26,317
7	Bengkulu	1,685	1,604	170.53	27,360
8	Lampung	2,279	2,171	154.80	33,603
9	Kep.Babel	297	283	100.49	2,840
10	Kep.Riau	205	196	102.39	2,003
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24,260	23,105	231.81	535,600
13	Jawa Tengah	7,550	7,191	244.16	175,571
14	DI Yogyakarta	263	250	119.70	2,998
15	Jawa Timur	11,688	11,131	257.56	286,694
16	Banten	1,397	1,330	131.70	17,518
17	Bali	1,873	1,783	126.44	22,549
18	Nusa Tenggara Barat	936	892	204.05	18,197
19	Nusa Tenggara Timur	7,734	7,366	58.15	42,834
20	Kalimantan Barat	1,875	1,786	123.52	22,055
21	Kalimantan Tengah	719	684	142.66	9,764
22	Kalimantan Selatan	1,068	1,017	214.18	21,784
23	Kalimantan Timur	1,176	1,120	134.89	15,109
24	Kalimantan Utara	225	215	80.71	1,732
25	Sulawesi Utara	2,510	2,390	93.05	22,241
26	Sulawesi Tengah	1,503	1,432	167.75	24,015
27	Sulawesi Selatan	5,312	5,059	233.66	118,217
28	Sulawesi Tenggara	1,599	1,523	128.40	19,555
29	Gorontalo	66	63	139.53	879
30	Sulawesi Barat	423	403	144.42	5,821
31	Maluku	2,052	1,954	124.43	24,317
32	Maluku Utara	678	645	171.85	11,091
33	Papua Barat	1,376	1,310	120.08	15,734
34	Papua	1,488	1,417	147.04	20,841

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 28. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		106,712	101,630	199.65	2,029,045
1	Aceh	447	425	182.15	7,746
2	Sumatera Utara	7,801	7,429	172.47	128,131
3	Sumatera Barat	6,046	5,758	301.52	173,616
4	Riau	637	606	147.09	8,918
5	Jambi	2,192	2,087	329.88	68,852
6	Sumatera Selatan	1,274	1,213	233.16	28,291
7	Bengkulu	1,809	1,723	170.70	29,412
8	Lampung	2,448	2,331	154.96	36,124
9	Kep.Babel	319	304	100.59	3,053
10	Kep.Riau	221	210	102.49	2,153
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	26,054	24,813	232.04	575,770
13	Jawa Tengah	8,108	7,722	244.41	188,739
14	DI Yogyakarta	282	269	119.82	3,223
15	Jawa Timur	12,552	11,954	257.82	308,196
16	Banten	1,500	1,428	131.83	18,832
17	Bali	2,011	1,915	126.57	24,241
18	Nusa Tenggara Barat	1,006	958	204.26	19,561
19	Nusa Tenggara Timur	8,306	7,910	58.21	46,047
20	Kalimantan Barat	2,013	1,918	123.64	23,709
21	Kalimantan Tengah	772	735	142.80	10,496
22	Kalimantan Selatan	1,147	1,092	214.39	23,417
23	Kalimantan Timur	1,263	1,203	135.03	16,243
24	Kalimantan Utara	242	230	80.79	1,862
25	Sulawesi Utara	2,695	2,567	93.14	23,909
26	Sulawesi Tengah	1,614	1,537	167.92	25,816
27	Sulawesi Selatan	5,705	5,433	233.90	127,084
28	Sulawesi Tenggara	1,717	1,636	128.53	21,022
29	Gorontalo	71	68	139.67	945
30	Sulawesi Barat	455	433	144.56	6,258
31	Maluku	2,204	2,099	124.55	26,141
32	Maluku Utara	728	693	172.02	11,922
33	Papua Barat	1,478	1,407	120.20	16,914
34	Papua	1,598	1,522	147.19	22,404

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 29. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2020

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		320,652	319,057	12.74	406,483.47
1	Aceh	1,962	1,685	12.15	2,048
2	Sumatera Utara	3,664	4,326	11.70	5,061
3	Sumatera Barat	2,720	3,071	14.06	4,319
4	Riau	563	761	9.23	703
5	Jambi	912	739	12.36	913
6	Sumatera Selatan	1,294	1,322	13.07	1,727
7	Bengkulu	726	2,259	10.34	2,335
8	Lampung	2,526	3,493	13.05	4,559
9	Kep.Babel	175	141	10.90	153
10	Kep.Riau	75	88	10.30	90
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	26,460	29,526	16.88	49,842
13	Jawa Tengah	61,561	56,459	13.35	75,347
14	DI Yogyakarta	58,273	49,069	10.51	51,577
15	Jawa Timur	94,955	95,656	12.78	122,209
16	Banten	3,021	5,132	12.60	6,467
17	Bali	4,477	4,777	11.01	5,261
18	Nusa Tenggara Barat	18,876	17,752	13.80	24,496
19	Nusa Tenggara Timur	9,861	9,022	9.15	8,256
20	Kalimantan Barat	615	612	11.49	703
21	Kalimantan Tengah	262	306	11.07	339
22	Kalimantan Selatan	2,917	5,511	12.40	6,833
23	Kalimantan Timur	560	658	12.53	824
24	Kalimantan Utara	98	149	10.54	157
25	Sulawesi Utara	1,320	2,818	12.35	3,480
26	Sulawesi Tengah	2,169	2,332	14.46	3,373
27	Sulawesi Selatan	13,980	12,994	13.54	17,589
28	Sulawesi Tenggara	4,071	3,531	7.26	2,563
29	Gorontalo	141	471	11.65	549
30	Sulawesi Barat	209	257	11.75	302
31	Maluku	751	810	9.94	805
32	Maluku Utara	114	1,741	10.76	1,872
33	Papua Barat	175	393	10.46	411
34	Papua	1,169	1,199	11.02	1,320

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 30. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2021

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		339,891	338,200	12.86	434,937
1	Aceh	2,099	1,981	13	2,595
2	Sumatera Utara	4,172	4,199	12	4,861
3	Sumatera Barat	2,910	3,035	15	4,413
4	Riau	592	558	10	560
5	Jambi	995	944	14	1,366
6	Sumatera Selatan	2,049	2,155	14	3,027
7	Bengkulu	872	859	13	1,087
8	Lampung	2,964	2,682	13	3,563
9	Kep.Babel	183	172	12	206
10	Kep.Riau	66	59	11	63
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	26,437	27,537	15	40,084
13	Jawa Tengah	57,871	58,185	14	83,297
14	DI Yogyakarta	64,928	63,644	11	72,731
15	Jawa Timur	104,081	103,477	13	131,861
16	Banten	3,222	2,942	12	3,388
17	Bali	4,869	4,859	14	6,672
18	Nusa Tenggara Barat	20,290	19,208	16	30,435
19	Nusa Tenggara Timur	11,636	12,760	9	12,000
20	Kalimantan Barat	693	664	11	754
21	Kalimantan Tengah	244	248	11	280
22	Kalimantan Selatan	3,192	3,792	10	3,952
23	Kalimantan Timur	651	606	11	697
24	Kalimantan Utara	122	119	10	113
25	Sulawesi Utara	1,595	1,509	13	1,957
26	Sulawesi Tengah	2,276	2,075	11	2,196
27	Sulawesi Selatan	13,759	12,953	13	16,782
28	Sulawesi Tenggara	4,120	4,159	7	2,857
29	Gorontalo	105	106	11	121
30	Sulawesi Barat	260	234	13	304
31	Maluku	959	892	10	869
32	Maluku Utara	18	44	12	51
33	Papua Barat	353	400	11	431
34	Papua	1,310	1,144	12	1,363

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 31. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2022

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		361,984	360,183	13.04	469,732
1	Aceh	2,236	2,224	13.28	2,955
2	Sumatera Utara	4,444	4,422	11.74	5,191
3	Sumatera Barat	3,099	3,084	14.74	4,547
4	Riau	631	628	10.17	639
5	Jambi	1,060	1,054	14.67	1,547
6	Sumatera Selatan	2,182	2,172	14.25	3,094
7	Bengkulu	928	924	12.83	1,185
8	Lampung	3,156	3,140	13.47	4,230
9	Kep.Babel	195	194	12.09	235
10	Kep.Riau	71	70	10.74	76
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	28,155	28,015	14.76	41,355
13	Jawa Tengah	61,632	61,326	14.52	89,030
14	DI Yogyakarta	69,148	68,804	11.59	79,735
15	Jawa Timur	110,846	110,295	12.89	142,173
16	Banten	3,431	3,414	11.68	3,987
17	Bali	5,186	5,160	13.92	7,185
18	Nusa Tenggara Barat	21,609	21,501	16.07	34,549
19	Nusa Tenggara Timur	12,393	12,331	9.54	11,759
20	Kalimantan Barat	738	734	11.52	845
21	Kalimantan Tengah	260	259	11.47	297
22	Kalimantan Selatan	3,400	3,383	10.57	3,576
23	Kalimantan Timur	693	690	11.66	804
24	Kalimantan Utara	130	129	9.66	125
25	Sulawesi Utara	1,698	1,690	13.16	2,223
26	Sulawesi Tengah	2,423	2,411	10.73	2,588
27	Sulawesi Selatan	14,653	14,580	13.14	19,157
28	Sulawesi Tenggara	4,387	4,366	6.97	3,041
29	Gorontalo	112	111	11.64	129
30	Sulawesi Barat	277	276	13.16	363
31	Maluku	1,022	1,016	9.88	1,005
32	Maluku Utara	19	19	11.68	22
33	Papua Barat	376	375	10.93	409
34	Papua	1,395	1,388	12.09	1,678

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 32. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2023

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		387,323	385,396	13.29	512,008
1	Aceh	2,392	2,380	13.53	3,220
2	Sumatera Utara	4,755	4,731	11.96	5,658
3	Sumatera Barat	3,316	3,300	15.02	4,956
4	Riau	675	672	10.37	696
5	Jambi	1,134	1,128	14.94	1,686
6	Sumatera Selatan	2,335	2,324	14.51	3,373
7	Bengkulu	993	988	13.07	1,292
8	Lampung	3,377	3,360	13.72	4,611
9	Kep.Babel	209	208	12.31	256
10	Kep.Riau	76	75	10.94	82
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	30,126	29,976	15.04	45,077
13	Jawa Tengah	65,947	65,618	14.79	97,043
14	DI Yogyakarta	73,988	73,620	11.81	86,911
15	Jawa Timur	118,605	118,015	13.13	154,969
16	Banten	3,671	3,653	11.90	4,345
17	Bali	5,549	5,521	14.18	7,831
18	Nusa Tenggara Barat	23,122	23,007	16.37	37,658
19	Nusa Tenggara Timur	13,260	13,194	9.71	12,817
20	Kalimantan Barat	789	785	11.73	921
21	Kalimantan Tengah	278	277	11.68	323
22	Kalimantan Selatan	3,638	3,620	10.77	3,898
23	Kalimantan Timur	742	738	11.88	876
24	Kalimantan Utara	139	138	9.84	136
25	Sulawesi Utara	1,817	1,808	13.40	2,423
26	Sulawesi Tengah	2,593	2,580	10.93	2,821
27	Sulawesi Selatan	15,679	15,601	13.38	20,881
28	Sulawesi Tenggara	4,694	4,671	7.10	3,315
29	Gorontalo	119	119	11.85	141
30	Sulawesi Barat	297	295	13.41	396
31	Maluku	1,093	1,088	10.07	1,095
32	Maluku Utara	20	20	11.90	24
33	Papua Barat	403	401	11.13	446
34	Papua	1,492	1,485	12.31	1,829

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 33. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		420,954	418,860	13.68	572,921
1	Aceh	2,600	2,587	13.93	3,604
2	Sumatera Utara	5,168	5,142	12.31	6,332
3	Sumatera Barat	3,604	3,586	15.46	5,545
4	Riau	733	730	10.67	779
5	Jambi	1,232	1,226	15.39	1,887
6	Sumatera Selatan	2,538	2,525	14.94	3,774
7	Bengkulu	1,080	1,074	13.45	1,445
8	Lampung	3,670	3,652	14.13	5,159
9	Kep.Babel	227	226	12.68	286
10	Kep.Riau	82	82	11.27	92
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	32,742	32,579	15.48	50,440
13	Jawa Tengah	71,673	71,316	15.23	108,588
14	DI Yogyakarta	80,413	80,013	12.15	97,251
15	Jawa Timur	128,904	128,262	13.52	173,405
16	Banten	3,990	3,970	12.25	4,862
17	Bali	6,031	6,001	14.60	8,763
18	Nusa Tenggara Barat	25,129	25,004	16.85	42,139
19	Nusa Tenggara Timur	14,411	14,340	10.00	14,342
20	Kalimantan Barat	858	853	12.08	1,031
21	Kalimantan Tengah	302	301	12.03	362
22	Kalimantan Selatan	3,954	3,934	11.09	4,361
23	Kalimantan Timur	806	802	12.23	981
24	Kalimantan Utara	151	150	10.13	152
25	Sulawesi Utara	1,975	1,965	13.80	2,711
26	Sulawesi Tengah	2,818	2,804	11.26	3,156
27	Sulawesi Selatan	17,040	16,955	13.78	23,365
28	Sulawesi Tenggara	5,102	5,077	7.31	3,710
29	Gorontalo	130	129	12.20	157
30	Sulawesi Barat	322	321	13.80	443
31	Maluku	1,188	1,182	10.37	1,225
32	Maluku Utara	22	22	12.25	27
33	Papua Barat	438	436	11.46	499
34	Papua	1,622	1,614	12.68	2,046

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 34. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2020

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		166,259	160,506	11.59	186,086
1	Aceh	1,010	980	11.19	1,097
2	Sumatera Utara	1,814	1,758	11.28	1,983
3	Sumatera Barat	236	228	12.97	295
4	Riau	226	219	10.89	238
5	Jambi	147	142	11.55	164
6	Sumatera Selatan	506	491	13.09	643
7	Bengkulu	203	196	10.11	198
8	Lampung	1,109	1,071	9.59	1,026
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	3,010	2,920	12.23	3,571
13	Jawa Tengah	89,765	86,623	12.26	106,220
14	DI Yogyakarta	304	294	5.67	167
15	Jawa Timur	36,122	34,872	12.05	42,034
16	Banten	994	960	8.62	827
17	Bali	164	159	7.68	122
18	Nusa Tenggara Barat	7,404	7,148	10.93	7,809
19	Nusa Tenggara Timur	13,456	12,999	6.38	8,291
20	Kalimantan Barat	1,134	1,094	7.75	848
21	Kalimantan Tengah	16	16	10.48	17
22	Kalimantan Selatan	174	168	12.04	203
23	Kalimantan Timur	166	160	10.82	173
24	Kalimantan Utara	17	16	10.25	17
25	Sulawesi Utara	503	485	11.06	537
26	Sulawesi Tengah	453	437	8.28	362
27	Sulawesi Selatan	5,883	5,679	14.04	7,974
28	Sulawesi Tenggara	300	289	9.18	265
29	Gorontalo	10	10	12.34	12
30	Sulawesi Barat	274	265	14.11	373
31	Maluku	453	437	4.70	205
32	Maluku Utara	201	194	10.03	195
33	Papua Barat	48	47	11.01	51
34	Papua	155	149	11.18	167

Sumber Ditjen Tanaman Pangan _

Lampiran 35. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2021

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		178,196	171,228	12	199,112
1	Aceh	643	468	9.23	431
2	Sumatera Utara	1,595	1,611	10.60	1,703
3	Sumatera Barat	306	300	10.43	312
4	Riau	193	191	9.99	190
5	Jambi	99	104	10.18	106
6	Sumatera Selatan	595	463	9.56	442
7	Bengkulu	180	180	10.04	181
8	Lampung	1,113	1,049	9.68	1,012
9	Kep.Babel	2	-	-	-
10	Kep.Riau	1	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	6,525	6,596	11.40	7,494
13	Jawa Tengah	90,491	86,025	12.00	102,800
14	DI Yogyakarta	465	462	8.37	385
15	Jawa Timur	38,373	36,810	12.32	45,232
16	Banten	731	595	7.87	467
17	Bali	292	261	9.03	235
18	Nusa Tenggara Barat	11,662	11,286	10.84	12,199
19	Nusa Tenggara Timur	12,663	12,560	9.77	12,238
20	Kalimantan Barat	870	656	7.47	489
21	Kalimantan Tengah	19	25	7.03	17
22	Kalimantan Selatan	250	240	9.84	236
23	Kalimantan Timur	146	143	10.74	153
24	Kalimantan Utara	18	19	8.95	17
25	Sulawesi Utara	176	159	10.77	171
26	Sulawesi Tengah	564	476	8.22	390
27	Sulawesi Selatan	8,590	9,006	12.04	10,814
28	Sulawesi Tenggara	568	547	8.44	461
29	Gorontalo	23	12	8.87	10
30	Sulawesi Barat	415	395	10.26	405
31	Maluku	320	286	7.73	220
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	47	45	9.83	45
34	Papua	260	256	10.09	258

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 36. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2022

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		190,991	182,666	11.66	213,049.26
1	Aceh	689	659	9.23	609
2	Sumatera Utara	1,709	1,635	10.60	1,733
3	Sumatera Barat	328	313	10.43	327
4	Riau	207	198	9.99	198
5	Jambi	106	101	10.18	103
6	Sumatera Selatan	638	610	9.56	583
7	Bengkulu	193	184	10.04	185
8	Lampung	1,193	1,141	9.68	1,104
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	6,994	6,689	11.40	7,623
13	Jawa Tengah	96,991	92,761	12.00	111,292
14	DI Yogyakarta	499	477	8.37	399
15	Jawa Timur	41,128	39,336	12.32	48,481
16	Banten	783	749	7.87	589
17	Bali	313	299	9.03	270
18	Nusa Tenggara Barat	12,500	11,957	10.84	12,962
19	Nusa Tenggara Timur	13,572	12,980	9.77	12,686
20	Kalimantan Barat	933	892	7.47	666
21	Kalimantan Tengah	21	20	7.03	14
22	Kalimantan Selatan	267	256	9.84	252
23	Kalimantan Timur	157	150	10.74	161
24	Kalimantan Utara	20	19	8.95	17
25	Sulawesi Utara	189	181	10.77	195
26	Sulawesi Tengah	605	579	8.22	476
27	Sulawesi Selatan	9,207	8,805	12.04	10,604
28	Sulawesi Tenggara	609	583	8.44	492
29	Gorontalo	25	24	8.87	21
30	Sulawesi Barat	445	426	10.26	437
31	Maluku	343	328	7.73	254
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	51	49	9.83	48
34	Papua	279	267	10.09	269

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 37. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2023

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		204,704	194,868	11.70	227,963
1	Aceh	739	703	9.26	651
2	Sumatera Utara	1,832	1,744	10.63	1,854
3	Sumatera Barat	351	334	10.46	350
4	Riau	222	211	10.02	212
5	Jambi	113	108	10.21	110
6	Sumatera Selatan	683	650	9.59	624
7	Bengkulu	206	196	10.07	198
8	Lampung	1,278	1,217	9.71	1,181
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	7,496	7,136	11.43	8,157
13	Jawa Tengah	103,955	98,960	12.03	119,085
14	DI Yogyakarta	535	509	8.39	427
15	Jawa Timur	44,081	41,963	12.36	51,875
16	Banten	839	799	7.89	631
17	Bali	335	319	9.05	289
18	Nusa Tenggara Barat	13,397	12,753	10.87	13,867
19	Nusa Tenggara Timur	14,546	13,847	9.80	13,574
20	Kalimantan Barat	1,000	951	7.49	713
21	Kalimantan Tengah	22	21	7.05	15
22	Kalimantan Selatan	287	273	9.87	269
23	Kalimantan Timur	168	160	10.77	172
24	Kalimantan Utara	21	20	8.98	18
25	Sulawesi Utara	202	193	10.80	208
26	Sulawesi Tengah	648	617	8.25	509
27	Sulawesi Selatan	9,868	9,394	12.08	11,346
28	Sulawesi Tenggara	653	622	8.47	526
29	Gorontalo	27	25	8.90	23
30	Sulawesi Barat	477	454	10.29	467
31	Maluku	368	350	7.76	272
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	55	52	9.86	51
34	Papua	299	284	10.12	288

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 38. Skenario Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Indonesia		219,402	207,919	11.73	243,960
1	Aceh	792	751	9.28	697
2	Sumatera Utara	1,963	1,861	10.66	1,984
3	Sumatera Barat	376	357	10.49	374
4	Riau	238	226	10.05	227
5	Jambi	121	115	10.24	118
6	Sumatera Selatan	732	694	9.62	668
7	Bengkulu	221	210	10.10	212
8	Lampung	1,370	1,298	9.74	1,264
9	Kep.Babel	-	-	-	-
10	Kep.Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	8,034	7,614	11.46	8,728
13	Jawa Tengah	111,419	105,588	12.07	127,443
14	DI Yogyakarta	573	543	8.42	457
15	Jawa Timur	47,246	44,774	12.40	55,515
16	Banten	900	853	7.92	675
17	Bali	359	340	9.08	309
18	Nusa Tenggara Barat	14,359	13,607	10.91	14,840
19	Nusa Tenggara Timur	15,591	14,775	9.83	14,526
20	Kalimantan Barat	1,071	1,015	7.52	763
21	Kalimantan Tengah	24	22	7.07	16
22	Kalimantan Selatan	307	291	9.90	288
23	Kalimantan Timur	180	171	10.81	185
24	Kalimantan Utara	23	21	9.01	19
25	Sulawesi Utara	217	206	10.83	223
26	Sulawesi Tengah	695	658	8.27	545
27	Sulawesi Selatan	10,576	10,023	12.12	12,143
28	Sulawesi Tenggara	700	663	8.50	563
29	Gorontalo	29	27	8.93	24
30	Sulawesi Barat	511	484	10.32	500
31	Maluku	394	374	7.78	291
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	58	55	9.89	55
34	Papua	320	303	10.15	308

Sumber Ditjen Tanaman Pangan

Lampiran 39. Luas Kerusakan Akibat Banjir Pada Tanaman Pangan Padi Tahun 2016-2020

No	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1	Aceh	36,549	5,912	25,399	5,217	9,060	375	6,142	496	27,086	5,818
2	Sumatera Utara	5,719	2,108	14,985	3,786	13,770	4,149	4,438	793	18,074	5,868
3	Sumatera Barat	5,359	1,044	3,232	456	4,513	672	2,069	482	2,083	369
4	Riau	11,917	4,689	6,538	448	7,805	4,663	4,816	1,489	719	199
5	Jambi	14,439	6,809	8,657	3,862	6,160	2,022	1,532	431	10,271	4,536
6	Sumatera Selatan	22,693	11,502	6,639	5,150	3,821	1,224	11,142	5,281	11,954	7,802
7	Bengkulu	26	11	67	17	230	0	755	262	198	91
8	Lampung	5,910	1,055	19,131	10,977	21,923	10,543	8,110	3,809	10,290	3,932
9	Kep. Bangka Belitung	1,511	462	576	200	51	5	45	5	71	0
10	Kep. Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. Jakarta	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	29,675	5,766	14,291	2,482	12,116	1,035	1,963	246	41,329	13,513
13	Jawa Tengah	41,376	7,994	29,327	6,649	16,919	3,523	28,587	7,332	34,941	6,378
14	DI. Yogyakarta	2,812	155	6,139	849	3	3	2,178	157	1,628	83
15	Jawa Timur	37,275	10,960	19,237	3,469	8,969	2,002	18,141	2,695	21,859	2,945
16	Banten	9,554	1,056	13,874	1,053	4,410	670	875	57	17,720	4,205
17	Bali	12	6	66	37	28	1	101	2	214	2
18	Nusa Tenggara Barat	3,268	453	9,474	2,849	1,509	279	669	8	25	0
19	Nusa Tenggara Timur	1,835	0	700	279	0	0	310	286	218	103
20	Kalimantan Barat	7,123	490	1,578	102	3,209	614	1,345	98	3,663	434
21	Kalimantan Tengah	5,659	515	6,723	1,181	1,045	138	1,855	62	3,169	163
22	Kalimantan Selatan	12,989	5,393	6,687	1,397	3,712	369	3,734	1,282	16,788	7,798
23	Kalimantan Timur	885	58	2,903	1,053	1,001	463	3,050	835	2,597	366
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	357	12	110	0	0	0	1,046	77
26	Sulawesi Tengah	1,444	61	1,990	296	1,003	278	4,168	495	4,596	1,871
27	Sulawesi Selatan	12,676	4,521	41,807	17,497	28,325	17,305	45,679	15,179	43,186	17,484
28	Sulawesi Tenggara	554	114	3,519	2,676	2,632	1,709	11,756	10,291	4,251	1,853
29	Gorontalo	2,541	758	1,798	439	352	50	0	0	1,040	26
30	Sulawesi Barat	9	0	710	52	138	10	55	20	100	2
31	Maluku	1,188	10	772	21	31	0	15	0	101	42
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	28	11	79	6
33	Papua Barat	1	0	11	0	0	0	0	0	3	2
34	Papua	0	0	28	5	504	73	0	0	0	0
	Jumlah	275,004	71,900	247,213	72,508	153,347	52,175	163,559	52,104	279,296	85,966

Keterangan : T = Terkena, P = Puso

Sumber Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Lampiran 40. Luas Kerusakan Akibat Kekeringan Pada Tanaman Padi Tahun 2016-Tahun 2020

No.	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1	Pemerintah Aceh	5,828	548	10,940	2,976	22,573	1,818	3,580	1,113	19,041	2,483
2	Sumatera Utara	13,534	346	1,457	50	3,930	43	4,405	98	5,662	124
3	Sumatera Barat	3,812	933	175	5	140	5	364	36	80	0
4	Riau	1,133	108	1,842	87	516	0	1,045	96	951	92
6	Jambi	830	23	489	21	1,779	97	7,287	3,243	425	0
7	Sumatera Selatan	710	6	705	78	2,604	54	7,986	943	394	0
9	Bengkulu	25	0	20	0	443	0	588	71	0	0
10	Lampung	563	0	319	37	7,418	1,794	16,845	5,883	239	0
8	Kep. Bangka Belitung	24	24	0	0	32	12	343	87	0	0
5	Kep. Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	32	0	9,665	1,170	32,142	719	70,142	31,271	11,860	2,664
14	Jawa Tengah	15,016	3,032	2,919	187	43,928	9,997	78,755	25,013	9,167	1,556
15	DI. Yogyakarta	4,864	36	20	3	589	107	11,385	3,687	0	0
16	Jawa Timur	11,112	11	1,003	155	38,016	10,046	42,715	10,503	4,536	427
13	Banten	446	18	958	22	5,163	1,216	24,553	9,706	2,610	377
17	Bali	38	0	399	128	232	40	553	36	308	46
18	Nusa Tenggara Barat	4,890	1,562	2,672	23	10,383	4,273	7,989	863	8,418	182
19	Nusa Tenggara Timur	1,638	532	37	21	234	59	4,338	2,576	1,039	54
20	Kalimantan Barat	65	0	178	0	4,636	14	2,809	1	93	0
21	Kalimantan Tengah	225	106	218	161	1,177	608	1,466	100	45	0
22	Kalimantan Selatan	3,117	2	19	0	2,457	0	1,571	244	3	0
23	Kalimantan Timur	3,942	386	86	0	517	4	3,538	107	146	0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	87	2	0	0	44	14	499	469	0	0
26	Sulawesi Tengah	488	124	0	0	31	30	2,207	693	293	0
27	Sulawesi Selatan	13,163	234	43,067	18,536	10,527	3,471	50,653	29,882	4,533	571
28	Sulawesi Tenggara	809	202	43	16	2,610	603	5,069	2,263	97	0
29	Gorontalo	2,408	605	0	0	151	32	2,332	198	381	0
30	Sulawesi Barat	110	4	422	7	236	9	3,580	39	155	0
31	Maluku	51	9	15	0	410	7	2	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	30	0	14	4
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua t	0	0	651	31	215	26	2	2	0	0
	Jumlah	88,958	8,852	78,317	23,714	193,130	35,097	356,633	129,220	70,487	8,579

Keterangan : T = Terkena, P = Puso

Sumber Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 41. Luas Kerusakan Akibat Banjir Pada Tanaman Jagung Tahun 2016-2020

No	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1	Aceh	2,958	691	4,314	1,153	2,965	396	327	30	2,578	702
2	Sumatera Utara	886	580	361	50	724	251	135	60	501	251
3	Sumatera Barat	618	393	822	343	847	157	326	171	183	91
4	Riau	168	139	109	30	192	95	74	18	236	162
5	Jambi	975	352	819	484	402	271	348	208	323	239
6	Sumatera Selatan	1,278	274	201	31	53	21	15	15	491	296
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	207	207	0	0
8	Lampung	647	478	49	35	221	88	20	20	400	333
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kep. Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	33	32	508	258	2	2	2	1	0	0
13	Jawa Tengah	7,575	1,199	313	237	81	15	117	5	1,876	1,112
14	DI. Yogyakarta	803	495	774	468	0	0	0	0	67	0
15	Jawa Timur	14,977	9,261	1,214	641	383	189	395	20	974	325
16	Banten	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5
17	Bali	46	25	1	1	0	0	0	0	61	9
18	Nusa Tenggara Barat	235	64	487	288	11	4	10	0	13	11
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	192	100	0	0	0	0	338	66
20	Kalimantan Barat	2	0	42	10	23	5	0	0	34	2
21	Kalimantan Tengah	28	3	80	50	35	10	1	1	9	0
22	Kalimantan Selatan	185	102	96	37	24	20	90	4	183	25
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	12	1	0	0	0	0	124	14
26	Sulawesi Tengah	213	117	967	531	11	0	248	123	821	465
27	Sulawesi Selatan	2,598	642	496	467	1,680	754	5,776	2,481	3,756	871
28	Sulawesi Tenggara	37	14	104	94	80	60	3,021	2,957	50	30
29	Gorontalo	1,255	592	6,923	1,326	58	55	613	0	353	134
30	Sulawesi Barat	674	125	458	237	373	61	1,174	277	49	13
31	Maluku	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
34	Papua	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Jumlah		36,198	15,577	19,341	6,869	8,170	2,457	12,900	6,596	13,438	5,158

Keterangan : T = Terkena, P = Puso
Sumber Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 42. Luas Kerusakan Akibat Banjir Pada Tanaman Jagung Tahun 2016-2020

No	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1	Aceh	924	22	0	0	24	3	64	3	518	17
2	Sumatera Utara	43,641	2,696	48,157	3,418	14,575	1	17,695	2	12,259	0
3	Sumatera Barat	303	2	125	16	31	0	20	8	0	0
4	Riau	166	28	131	0	23	0	43	0	0	0
5	Jambi	21	8	0	0	173	26	561	145	2	0
6	Sumatera Selatan	17	0	20	0	1	0	26	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0
8	Lampung	0	0	916	0	166	2	2,810	389	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kep. Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	499	233	0	0
13	Jawa Tengah	8	5	2,365	0	1,185	53	935	235	371	28
14	DI. Yogyakarta	0	0	23	0	68	3	100	4	0	0
15	Jawa Timur	767	0	142	2	718	0	4,868	411	155	0
16	Banten	0	0	6,978	164	164	0	347	136	4	0
17	Bali	3,074	0	0	0	10	0	89	0	435	0
18	Nusa Tenggara Barat	5,964	0	3,101	0	8,934	1,872	4,962	304	24,392	202
19	Nusa Tenggara Timur	7,977	1,736	30	0	0	0	99	93	11,619	4,339
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	39	1	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	2	0	78	51	0	0
22	Kalimantan Selatan	41	0	4	0	497	0	48	0	39	0
23	Kalimantan Timur	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	97	5	0	0	69	4	2	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	60	43	15	0	15	15	3,251	1,730	3	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	849	521	0	0	2,784	503	410	0
28	Sulawesi Tenggara	253	0	0	0	54	35	83	24	0	0
29	Gorontalo	24,235	17,326	26	0	367	23	9,203	872	3,016	22
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	67	0	0	0	14	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
	Jumlah	87,566	21,871	62,881	4,121	27,178	2,037	48,650	5,142	53,238	4,610

Keterangan : T = Terkena, P = Puso

Sumber Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 43. Luas Kerusakan Akibat Banjir Pada Tanaman Kedelai Tahun 2016-2020

No	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1	Aceh	679	393	232	61	48	36	0	0	12	12
2	Sumatera Utara	2,861	2,065	5	0	83	27	8	1	25	11
3	Sumatera Barat	14	3	0	0	3	2	0	0	0	0
4	Riau	82	5	221	192	740	629	0	0	0	0
5	Jambi	501	445	373	63	108	100	205	12	0	0
6	Sumatera Selatan	774	219	115	40	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	40	37	134	128	42	26	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kep. Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	2,142	1,254	507	127	0	0	3	3	54	41
13	Jawa Tengah	4,982	2,216	73	64	12	2	25	15	321	188
14	DI. Yogyakarta	459	251	19	14	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	5,183	1,846	409	384	20	10	0	0	3	2
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
18	Nusa Tenggara Barat	12	11	45	0	1	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	2	0	376	15	0	0	0	0	1	0
21	Kalimantan Tengah	1,238	1,236	33	33	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	396	248	38	34	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	27	27	11	11	48	7	1	1	90	50
27	Sulawesi Selatan	565	69	83	79	52	52	22	22	0	0
28	Sulawesi Tenggara	119	49	2	2	38	38	16	0	20	20
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	30	30	9	4	75	9	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0
Jumlah		20,106	10,403	2,701	1,263	1,269	937	280	54	601	339

Keterangan : T = Terkena, P = Puso

Sumber Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 44. Luas Kerusakan Akibat Kekeringan Pada Tanaman Kedelai Tahun 2016-2020

No.	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1	Pemerintah Aceh	437	232	30	20	60	17	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	42	0	0	0	6	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
4	Riau	406	126	7	0	28	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	9	6	226	19	22	8	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	66	0	243	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	5	4	1,342	96	20	3	0	0
14	DI. Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	12	0	0	0	0	0	236	50	0	0
16	Banten	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	1,160	0	6	0	15	0	867	0	170	55
19	Nusa Tenggara Timur	26	0	0	0	9	5	49	49	7	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	161	161	161	161	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	92	12	0	0	0	0	0	0	73	0
27	Sulawesi Selatan	181	0	55	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	201	80	0	0	60	50	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		2,540	450	339	191	2,329	348	1,194	110	358	55

Keterangan : T = Terkena, P = Puso
Sumber Direktorat Jenderal Tanaman Pangan